

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

LAPORAN NUSANTARA

JULI 2023



Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

LAPORAN
NUSANTARA

JULI 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PRAKATA	v
BAGIAN I Ringkasan Eksekutif	1
BAGIAN II Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah	5
BAGIAN III Isu Strategis: Strategi Daya Ungkit Mendorong Perekonomian Nasional	17
BOKS 1 Model Bisnis, Tahapan dan <i>Lesson Learned</i> Hilirisasi Pangan	26
BOKS 2 Operasionalisasi Strategi Hilirisasi Pangan	28
BOKS 3 Inovasi Hilirisasi Tanaman Kelapa Sawit Berbasis Koperasi: Pabrik Minyak Makan Merah (3M)	30
BOKS 4 Mengatasi Pasokan Tebu Berkualitas yang Terbatas untuk Mendorong Kinerja Pertanian dan Menjaga Inflasi	32
BOKS 5 Hilirisasi Rumput Laut Sebagai Daya Ungkit Mendorong Perekonomian Nasional	34
BOKS 6 Hilirisasi Perikanan di Sulampua Masih Terkonsentrasi pada Industri Antara	36

Prakata

Laporan Nusantara merupakan laporan yang menyampaikan gambaran kondisi terkini dan prospek perekonomian nasional dalam perspektif spasial. Asesmen perekonomian spasial didasarkan pada perkembangan perekonomian di lima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Laporan ini dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

Publikasi Laporan Nusantara edisi ini secara khusus mengangkat isu strategis mengenai “Strategi Daya Ungkit Perekonomian Nasional”. Isu ini menjadi penting didalami sejalan dengan upaya struktural untuk mengakselerasi kecepatan pemulihan ekonomi di tengah tantangan perekonomian global. Laporan secara khusus mendiskusikan strategi hilirisasi pangan dan upaya penguatan sektor perumahan sebagai salah satu strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah. Harapan tersebut kami visualisasikan pada sampul Laporan Nusantara melalui mercu suar sebagai simbol proses navigasi dalam mendukung penguatan struktur ekonomi, dengan sentuhan motif batik Sidomukti Ornamen Meru yang melambangkan keteguhan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya Laporan Nusantara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita bersama untuk berkarya demi nusa dan bangsa, membangun untuk Indonesia Maju.

Jakarta, 28 Juli 2023

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Firman Mochtar

Direktur Eksekutif

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAGIAN 1

Ringkasan Eksekutif

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia masih sesuai prakiraan namun disertai dengan pergeseran sumber pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan lebih baik, dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan perbaikan upah dan keyakinan konsumen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih rendah sejalan dengan tertahannya konsumsi dan investasi terutama sektor properti. Tekanan inflasi yang masih persisten di negara maju khususnya AS dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat sehingga kebijakan moneter ketat masih akan berlanjut. Dengan perkembangan tersebut, ketidakpastian pasar keuangan masih akan tetap tinggi.

Di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kinerja perekonomian di berbagai daerah pada triwulan II 2023 diperkirakan meningkat, ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik. Permintaan domestik meningkat seiring dengan pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak akhir 2022, perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara. Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh meningkat, didukung oleh keyakinan konsumen dan ekspektasi penghasilan yang tetap kuat, di tengah dukungan stimulus fiskal di daerah pada triwulan II 2023 yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, kinerja investasi triwulan II 2023 masih kuat seiring berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah wilayah, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Proyek konstruksi swasta berlanjut namun berisiko tertahan khususnya residensial. Selain itu, investasi nonbangunan diperkirakan meningkat pada triwulan II 2023, terindikasi dari kinerja impor barang modal di tengah berlanjutnya hilirisasi khususnya di Sulampua.

Sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global, kinerja ekspor nonmigas triwulan II 2023 diperkirakan melambat. Secara spasial, kinerja ekspor berbagai produk manufaktur Jawa seperti produk otomotif melambat, namun tertahan oleh perbaikan ekspor alas kaki. Di Sulampua, kinerja ekspor terutama besi baja melambat seiring dengan terbatasnya permintaan Tiongkok. Sementara itu, ekspor Balinusra terutama konsentrat tembaga turut melambat. Lebih lanjut, kinerja ekspor nonmigas Sumatera dan Kalimantan turut tertahan seiring penurunan ekspor SDA, terutama batu bara. Namun, perbaikan kinerja ekspor CPO menopang masih terjaganya kinerja ekspor nasional.

Perekonomian domestik menopang proses perbaikan sejumlah Lapangan Usaha (LU) di berbagai wilayah pada triwulan II 2023. Kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2023 diperkirakan tetap kuat, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat saat HBKN. Pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara turut mendorong daya beli masyarakat, tercermin pada indikator penjualan eceran yang meningkat di sebagian besar wilayah, serta keyakinan konsumen terutama di Jawa. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) juga tetap kuat, ditopang oleh peningkatan aktivitas pariwisata di berbagai daerah seiring penambahan jumlah hari cuti bersama serta penyelenggaraan MICE/event internasional. Kinerja LU Pertanian diperkirakan membaik di seluruh wilayah, ditopang oleh perkebunan, tabama, dan hortikultura. Produksi Tandan Buah Segar (TBS) meningkat di Sumatera, didorong oleh peningkatan luas lahan *replanting* yang memasuki usia produktif, dan di Kalimantan didukung pemupukan yang baik. Produksi padi juga diperkirakan meningkat seiring periode musim panen di sejumlah daerah sentra di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Sementara itu, prospek sejumlah LU pada triwulan II 2023 turut terdampak oleh perlambatan ekonomi global. Pada LU Industri Pengolahan, kinerja produksi CPO di Sumatera dan Kalimantan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dimulainya kebijakan B35 sejak triwulan I 2023 dan kebijakan Pemerintah terkait DMO. Namun, prospek perlambatan perekonomian global memengaruhi kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa, khususnya TPT dan alas kaki. Meskipun demikian, ekspor industri logam dasar khususnya logam timah Sumatera dan logam alumina Kalimantan diperkirakan tetap meningkat. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan diperkirakan tertahan pada triwulan II 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Pertambangan di Sulampua didukung oleh aktivitas pertambangan tembaga, sementara kinerja pertambangan nikel dipengaruhi oleh *maintenance* pada beberapa *line smelter*. Produksi tembaga di Balinusra diperkirakan menurun seiring tertahannya pertumbuhan kapasitas produksi. Di sisi lain, pertumbuhan produksi batubara di Sumatera dan Kalimantan masih sesuai prakiraan, didukung oleh terjaganya alokasi serapan domestik.

Prospek perekonomian spasial keseluruhan 2023 diperkirakan tetap kuat didukung oleh permintaan domestik. Indikator dini ekonomi daerah membaik, didukung oleh terjaganya daya beli seiring meredanya

tekanan inflasi yang diperkirakan kembali pada kisaran sasaran $3\pm 1\%$ di 2023. Kinerja konsumsi diperkirakan tetap kuat sepanjang 2023, ditopang oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat seiring berakhirnya status pandemi COVID-19, penyelenggaraan *event* olahraga internasional di Jawa dan Balinusra, serta persiapan Pemilu menjelang akhir tahun. Sementara itu, prospek investasi lebih baik dari tahun sebelumnya meski berisiko tertahan akibat sejumlah kendala pada investasi bangunan. Peran fiskal daerah diperkirakan berlanjut, termasuk dalam menjaga stabilitas inflasi. Sementara itu, ekspor diperkirakan terjaga meski lebih rendah dari prakiraan sejalan dengan perlambatan perekonomian global. Secara spasial, kinerja ekonomi pada 2023 di sebagian wilayah diperkirakan tetap kuat, didukung oleh permintaan domestik meski tidak sekuat proyeksi sebelumnya akibat perlambatan kinerja eksternal.

Berdasarkan LU, prospek pertumbuhan untuk keseluruhan 2023 lebih ditopang oleh permintaan domestik di tengah perekonomian global yang lebih tertahan. Perbaikan permintaan domestik menopang prospek kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Pertambangan di tengah tertahannya kinerja eksternal. Kinerja LU Akmamin diperkirakan tumbuh lebih tinggi, didukung oleh peningkatan jumlah perhelatan *event* bertaraf nasional dan internasional yang turut diikuti oleh peningkatan wisman dan wisnus. Sementara itu, prospek kinerja LU Pertanian diperkirakan meningkat namun perlu mewaspadaikan risiko dampak El Nino yang menahan produktivitas. Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan tetap kuat meski melambat, terutama akibat normalisasi pertumbuhan setelah tumbuh tinggi pada 2022. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi 4,5-5,3%.

Ke depan, proses perbaikan struktur ekonomi perlu terus dilanjutkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih *broad based*. Perekonomian domestik tumbuh baik namun lebih ditopang oleh *contact intensive sectors* sehingga memengaruhi kecepatan pemulihan ekonomi. Dampak pengganda/*multiplier contact intensive sectors*, yaitu LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud), LU Perdagangan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum (Akmamin) lebih terbatas. Untuk itu, upaya secara struktural perlu diperkuat dan dapat difokuskan, antara lain pada LU Pertanian dan LU Konstruksi. Melalui hilirisasi pangan, subsektor LU Pertanian dapat beralih menjadi subsektor industri mamin yang memiliki keterkaitan dan dampak ekonomi yang lebih besar. Sementara itu, sektor konstruksi menghadapi tantangan seiring kinerja investasi bangunan terkait perumahan yang masih dapat

ditingkatkan. Upaya mendorong perekonomian nasional melalui hilirisasi pangan dan penguatan sektor perumahan dibahas secara khusus pada Bagian III Isu Strategis: Strategi Daya Ungkit Mendorong Perekonomian Nasional.

Hilirisasi pangan menjadi salah satu strategi dalam memperkuat struktur perekonomian nasional yang berfokus pada subsektor di LU Pertanian. Hilirisasi telah dimulai dari mineral yang didukung berbagai kebijakan strategis Pemerintah, dan telah menopang kinerja Industri. Upaya hilirisasi tersebut berpotensi untuk diperluas ke hilirisasi pangan guna mendorong peningkatan nilai tambah, mendukung terjaganya inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan hilirisasi pangan ini juga menjadi komitmen dan arah kebijakan dari Pemerintah dalam jangka menengah. Mempertimbangkan sejumlah kriteria, hilirisasi pangan dapat difokuskan pada komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan mempertimbangkan keunggulan komoditas di setiap wilayah yang diharapkan dapat berperan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

Kinerja konstruksi khususnya perumahan perlu diperkuat melalui sinergi koordinasi kebijakan. Penjualan sektor properti residensial di hampir seluruh wilayah tertahan dipengaruhi tantangan keterjangkauan harga dan pergeseran preferensi. Dalam mendorong kinerja sektor properti sebagai daya ungkit perekonomian nasional, diperlukan dukungan kebijakan dari sisi *supply* dan *demand*. Dari sisi *supply*, kepastian regulasi terkait perencanaan tata ruang, didukung infrastruktur konektivitas menjadi faktor yang dapat mendorong kinerja sektor perumahan. Sementara itu, dari sisi *demand*, strategi kebijakan yang komprehensif di sektor properti diperlukan mempertimbangkan masih tingginya *potential demand* perumahan terutama untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik dari sektor formal maupun informal dan segmen milenial pekerja formal yang *bankable*. Kebijakan tersebut memerlukan sinergi kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait dan pelaku usaha.

Upaya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi juga perlu didukung optimalisasi belanja daerah dan pariwisata. Optimalisasi belanja daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung perbaikan ekonomi termasuk dalam pengendalian inflasi daerah perlu terus didorong. Selain itu, prospek kinerja pariwisata perlu terus ditingkatkan didukung optimalisasi pembukaan wisman dan aktivitas wisnus, seiring peningkatan *Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions* (MICE) dan *event*, serta berbagai langkah untuk mendorong mobilitas wisnus termasuk melalui Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Inflasi gabungan kota IHK di seluruh wilayah pada triwulan II 2023 kembali ke dalam sasaran dan diprakirakan mendukung pencapaian sasaran inflasi 2023. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara nasional sebesar 3,52% (yoy) pada triwulan II 2023, menurun dari 4,97% (yoy) pada triwulan I 2023. Perkembangan tersebut mendukung IHK kembali ke dalam rentang sasaran inflasi nasional pada 2023 sebesar 3,0%±1%. Penurunan tekanan inflasi pada periode laporan terjadi di seluruh wilayah, disumbang oleh seluruh kelompok disagregasi inflasi yakni inti, *administered prices* (AP) dan *volatile food* (VF). Perkembangan ini sejalan dengan ekspektasi inflasi yang tetap terkendali didukung oleh berbagai kebijakan pengendalian inflasi, penurunan tekanan harga komoditas global, kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan penurunan tarif angkutan udara (AU),

serta terjaganya pasokan pangan strategis didukung oleh sinergi pengendalian inflasi pangan.

Penurunan inflasi pada triwulan II 2023 didukung oleh konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia serta eratnya sinergi pengendalian inflasi bersama Pemerintah. Respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pre-emptive* dan *forward looking*, secara konsisten mendukung pengendalian inflasi yang stabil dalam rentang sasaran. Bank Indonesia bersama Pemerintah (Pusat dan Daerah), serta Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) berkomitmen dan terus memperkuat program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mengendalikan inflasi VF. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali pada sasaran 3,0%±1% pada sisa tahun 2023.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAGIAN 2

Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

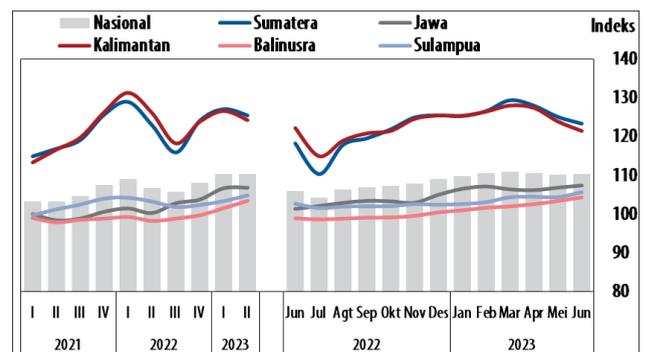
Kinerja perekonomian daerah pada triwulan II 2023 diperkirakan tumbuh lebih baik dari prakiraan sebelumnya ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, di tengah perlambatan ekspor. Perbaikan permintaan domestik pada triwulan II 2023 diperkirakan berlanjut didukung penambahan libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pemberian gaji ke-13. Investasi triwulan II 2023 membaik didukung pelaksanaan berbagai proyek ditandai dengan perbaikan indikator investasi, di antaranya penjualan semen, impor barang konstruksi, impor barang modal, dan *Purchasing Managers Index* (PMI). Sementara itu, ekspor triwulan II 2023 lebih lambat dari prakiraan sebelumnya yang berpotensi menurunkan prospek kinerja lapangan usaha (LU) di berbagai wilayah, khususnya LU Pertambangan di Sumatera, LU Industri Pengolahan di Sumatera dan Jawa, serta LU Perdagangan di Sumatera. Perkembangan ekspor ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tidak setinggi prakiraan semula, di tengah berlanjutnya perbaikan PDB *advanced economies*.

Prospek kinerja ekonomi tahun 2023 diperkirakan tetap kuat di tengah permintaan global yang tidak setinggi prakiraan sebelumnya. Permintaan domestik masih kuat didukung perbaikan penghasilan dan ekspektasi kendati belum bersifat *broad-based*. Prospek investasi diperkirakan berlanjut meskipun menghadapi sejumlah tantangan di sektor properti, perilaku *wait and see* terkait Pemilu, di tengah realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih sejalan dengan prakiraan. Prospek ekspor 2023 diperkirakan tertahan dan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan menurunnya *terms of trade*. Produksi beberapa komoditas utama direvisi ke bawah, yaitu besi baja, otomotif, dan alas kaki karena permintaan yang melemah. Sementara itu, produksi batubara, *crude palm oil* (CPO), kimia, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) masih sejalan dengan prakiraan. Kondisi tersebut memengaruhi kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa, serta LU Pertambangan di Sumatera dan Sulampua. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 diperkirakan tetap dalam kisaran proyeksi 4,5-5,3%.

Kinerja Sisi Permintaan

Konsumsi Swasta

Konsumsi swasta pada triwulan II 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Berlanjutnya perbaikan aktivitas ekonomi yang didukung pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak akhir 2022 turut mendorong peningkatan serapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat di berbagai wilayah. Perkembangan tersebut terkonfirmasi dari perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di sebagian besar wilayah, terutama produsen tanaman pangan di Jawa, Balinusra, dan Sulampua (Grafik II.1). Sementara itu, NTP di Sumatera dan Kalimantan tetap tinggi, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan perlambatan ekspor dan harga CPO. Daya beli masyarakat yang terjaga juga didukung meredanya tekanan inflasi pada triwulan II 2023 di seluruh wilayah. Di samping itu, faktor musiman HBKN Idulfitri, Iduladha, libur sekolah, disertai stimulus Pemerintah turut mendukung kinerja konsumsi tetap kuat pada triwulan II 2023. Perkembangan tersebut mendorong perbaikan keyakinan konsumen di sebagian besar wilayah (Grafik II.2). Kinerja konsumsi yang tetap kuat di berbagai wilayah juga tercermin dari perkembangan positif penjualan ritel pada akhir triwulan II 2023.

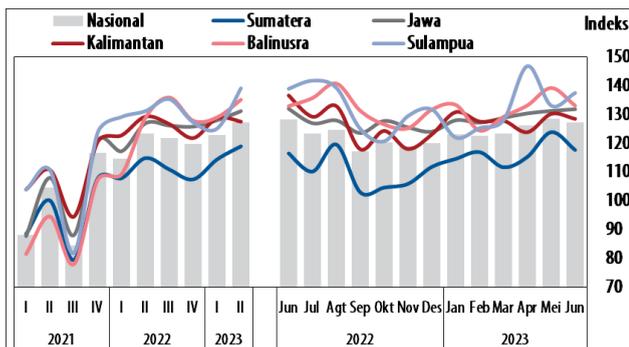


Sumber: BPS, diolah

Grafik II.1. Nilai Tukar Petani

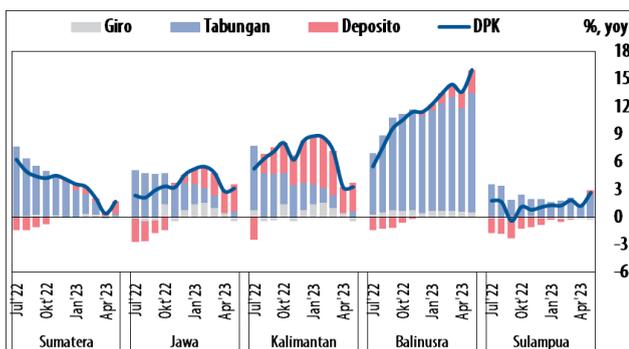
Perbaikan pada triwulan II 2023 turut mendukung konsumsi swasta tetap kuat sepanjang 2023, sejalan dengan prakiraan sebelumnya. Berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi nasional yang ditopang permintaan domestik diperkirakan menopang prospek pendapatan ke depan. Prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik dari prakiraan sebelumnya juga berpotensi mendorong perbaikan serapan tenaga kerja industri padat karya berorientasi ekspor, terutama di Jawa. Perkembangan

tersebut terindikasi dari perbaikan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja di sebagian besar wilayah. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok perlu terus dicermati. Inflasi juga diperkirakan terus melandai dan mencapai kisaran target $3 \pm 1\%$ di seluruh wilayah pada semester II 2023. Pembiayaan konsumsi ke depan diperkirakan turut didukung oleh perbaikan deposito perseorangan pada Mei 2023 di seluruh wilayah (Grafik II.3). Lebih lanjut, kebijakan pencabutan status pandemi oleh Pemerintah pada 21 Juni 2023 dapat mendukung peningkatan mobilitas dan aktivitas konsumsi pada semester II 2023.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.2. Indeks Keyakinan Konsumen Wilayah



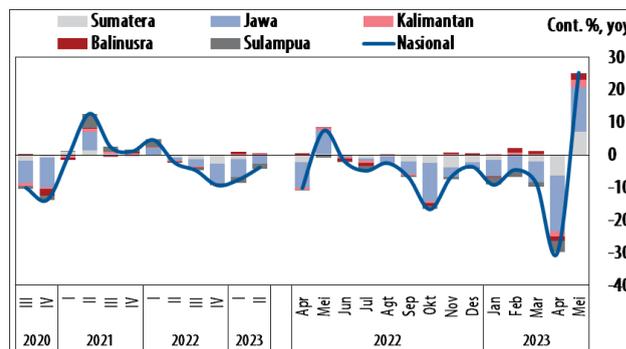
Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.3. DPK Perseorangan Wilayah

Investasi

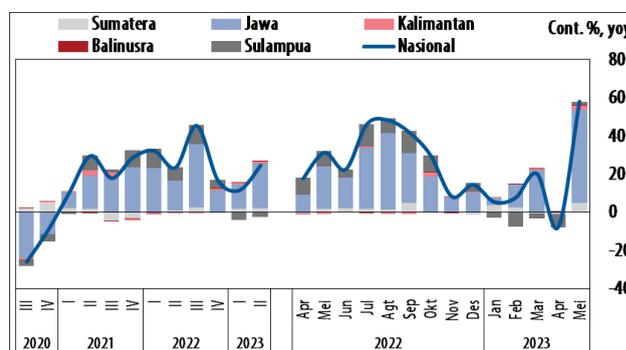
Kinerja investasi daerah diperkirakan meningkat pada triwulan II 2023, ditopang baik investasi bangunan maupun nonbangunan. Indikator penjualan semen (Grafik II.4) mengindikasikan perbaikan kinerja investasi bangunan pada triwulan II 2023 kendati masih dalam fase kontraksi. Peningkatan terutama bersumber dari investasi bangunan wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulampua, ditopang berlanjutnya pembangunan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti jalan tol, kereta api, dan kawasan industri. Di Balinusra dan Kalimantan, investasi bangunan terindikasi tetap kuat meskipun melambat, ditopang proyek Pemerintah dan swasta. Selain itu, proyek infrastruktur IKN turut mendorong investasi bangunan. Di sisi lain, sejumlah kendala antara lain pengadaan lahan, perizinan, dan kendala teknis pembangunan di sebagian wilayah perlu dicermati.

Dari sisi investasi nonbangunan, indikator impor barang modal (Grafik II.5) mengindikasikan kinerja triwulan II 2023 yang lebih optimis. Investasi nonbangunan membaik di berbagai wilayah, terutama ditopang investasi LU Industri Pengolahan dalam memenuhi permintaan domestik. Di Jawa, investasi swasta menopang kinerja investasi nonbangunan, terutama pada industri petrokimia dan otomotif. Sementara itu, peningkatan kapasitas industri *pulp & paper* sejalan dengan menguatnya permintaan bahan baku kertas menopang kinerja investasi nonbangunan di Sumatera. Peningkatan kapasitas industri hilirisasi nikel di Sulampua dan tambang batu bara di Kalimantan juga turut mendorong kinerja investasi nonbangunan pada triwulan II 2023.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.4. Penjualan Semen Wilayah Tahun 2023



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.5. Nilai Impor Barang Modal Wilayah Tahun 2023

Prospek kinerja investasi daerah pada 2023 diperkirakan tetap kuat. Kinerja investasi bangunan terindikasi membaik di hampir seluruh wilayah, terutama didorong berlanjutnya penyelesaian PSN dan proyek swasta. Sementara itu, investasi nonbangunan diperkirakan tetap tumbuh tinggi meski tertahan, sejalan kebutuhan penambahan kapasitas produksi yang lebih terbatas akibat tertahannya perekonomian global. Investasi di Jawa diperkirakan meningkat sejalan prakiraan, didorong oleh capaian pembangunan PSN konektivitas jalan tol dan kereta api yang secara umum masih sesuai target, di samping investasi peningkatan kapasitas produksi industri otomotif dan petrokimia. Sementara itu, keberlanjutan pembangunan IKN menopang kinerja investasi di wilayah Kalimantan yang

sejalan prakiraan, di tengah berlangsungnya penyelesaian sejumlah proyek *multiyears* meliputi kawasan industri, infrastruktur irigasi, jembatan, dan jalan tol. Pembangunan sejumlah PSN kawasan industri juga menjaga kinerja investasi di wilayah Sulampua sejalan dengan prakiraan, meski melambat seiring investasi pertambangan tembaga Papua yang tidak sebesar periode sebelumnya. Kinerja investasi wilayah Sumatera diprakirakan meningkat, ditopang oleh realisasi proyek konstruksi sebagian besar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang masih sejalan dengan target. Selanjutnya, percepatan infrastruktur pendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 menopang peningkatan investasi di Sumatera. Investasi di wilayah Balinusra diprakirakan meningkat, didorong oleh percepatan infrastruktur pendukung ASEAN Summit, di samping PSN irigasi dan proyek strategis lainnya di sektor pariwisata dan industri logam.

Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah

Stimulus fiskal di daerah pada triwulan II 2023 diprakirakan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Prospek positif kinerja realisasi APBD tercermin dari perbaikan sisi pendapatan maupun belanja Pemerintah Daerah. Dari segi pendapatan, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Mei 2023 secara agregat tercatat membaik, terutama ditopang oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) (Tabel II.1). Selain itu, DAK Non Fisik, DAK Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa juga tercatat mengalami peningkatan penyaluran yang didorong oleh perbaikan pemenuhan syarat salur oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Pemerintah Daerah dari TKD ini masih mendominasi pendapatan APBD. Sejalan dengan perbaikan TKD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh wilayah pun mengalami peningkatan, terutama didukung oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan peningkatan PAD tertinggi di wilayah Jawa. Seiring dengan adanya peningkatan pendapatan, stimulus Pemerintah Daerah yang direalisasikan melalui belanja APBD juga menunjukkan peningkatan. Hal ini terutama terjadi pada jenis belanja pegawai karena ditunjang realisasi tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada momen HBKN serta belanja barang jasa karena didorong realisasi belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas. Meskipun demikian, optimalisasi pemanfaatan APBD, khususnya melalui pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Belanja Bantuan Sosial (Bansos), dan Belanja Subsidi, perlu terus diperkuat untuk mendukung perbaikan ekonomi daerah, antara lain untuk menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terutama di daerah dengan inflasi dan kemiskinan yang relatif tinggi, terutama di beberapa daerah di wilayah Sumatera, Balinusra, dan Sulampua.

Lebih lanjut, ruang fiskal daerah, khususnya untuk penguatan upaya pengendalian inflasi daerah, dapat

terus dioptimalkan. Dalam hal ini, alokasi DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk tahun 2023 tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian hingga Mei 2023 pun tercatat cukup baik, yakni setengah dari keseluruhan Pemda telah mendapatkan 50% dari anggaran DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian tahunan. Kinerja yang cukup baik tersebut perlu terus didorong agar diikuti dengan realisasi dana yang optimal dari Pemda untuk mendukung ketersediaan pasokan dan kebutuhan pangan di daerah.

Tabel II.1. Transfer ke Daerah (TKD)

TKD (Tribun Rp)	Pagu Perpres 98/2022	Pagu 2023	Realisasi				
			s.d. Mei 2022	s.d. Mei 2023	% thp pagu s.d. Mei 2022	% thp pagu s.d. Mei 2023	Mei 2023 (yoy)
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	140.4	136.3	22.0	40.7	15.7%	29.9%	85.0%
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	378.0	396.0	184.9	162.3	48.9%	41.0%	-12.2%
3. Dana Transfer Khusus	189.6	185.8	43.1	53.7	22.7%	28.9%	24.6%
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.9	53.4	1.9	2.6	3.0%	4.8%	38.1%
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	128.7	130.3	41.2	50.5	32.0%	38.8%	22.6%
c. Hibah ke Daerah	-	2.1	0.0	0.6	-	26.9%	0.0%
4. Insentif Fiskal	7.0	8.0	1.0	1.1	14.3%	13.1%	4.6%
5. Dana Otsus dan Keistimewaan	21.8	18.7	6.3	5.3	29.1%	28.3%	-16.5%
6. Dana Desa	68.0	70.0	27.0	27.3	39.6%	39.0%	1.3%
TKD	804.8	814.7	284.3	290.3	35.3%	35.6%	2.1%

Sumber: Kemenkeu, diolah

Secara keseluruhan tahun 2023, kinerja fiskal diprakirakan lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya. Peningkatan kinerja belanja Pemerintah Daerah terutama didukung oleh meningkatnya alokasi APBD yang diikuti dengan upaya percepatan penyerapan sehingga dapat mempercepat *trickle down effect* ke perekonomian di daerah. Faktor lain yang mendorong realisasi belanja Pemerintah Daerah ke depan yakni adanya penguatan sinergi antarinstansi dalam mencanangkan dan mengimplementasikan berbagai program pengendalian inflasi. Selain itu, berlanjutnya implementasi kartu kredit pemerintah di daerah diprakirakan turut mendorong upaya percepatan realisasi anggaran, khususnya belanja barang dan jasa pada keseluruhan tahun 2023. Di samping itu, arahan dari Presiden untuk mempercepat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta digitalisasi pengadaan melalui *e-katalog*, diprakirakan dapat mendorong perbaikan kinerja APBD. Dari sisi pendapatan APBD, khususnya PAD, juga diprakirakan meningkat seiring pemulihan ekonomi daerah yang akan mendorong penerimaan pajak konsumtif seperti pajak hotel dan restoran. Meskipun demikian, terdapat faktor risiko yang dapat menahan akselerasi perbaikan fiskal daerah secara lebih lanjut. Kebijakan DAU *earmarked* yang belum sepenuhnya dapat diikuti dengan kesiapan dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi persyaratan salurnya berdampak pada tertahannya penyaluran DAU di sejumlah daerah. Hal ini dapat menghambat realisasi belanja Pemerintah Daerah mempertimbangkan ketergantungan APBD terhadap TKD yang tinggi. Untuk itu, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu diperkuat dalam memenuhi

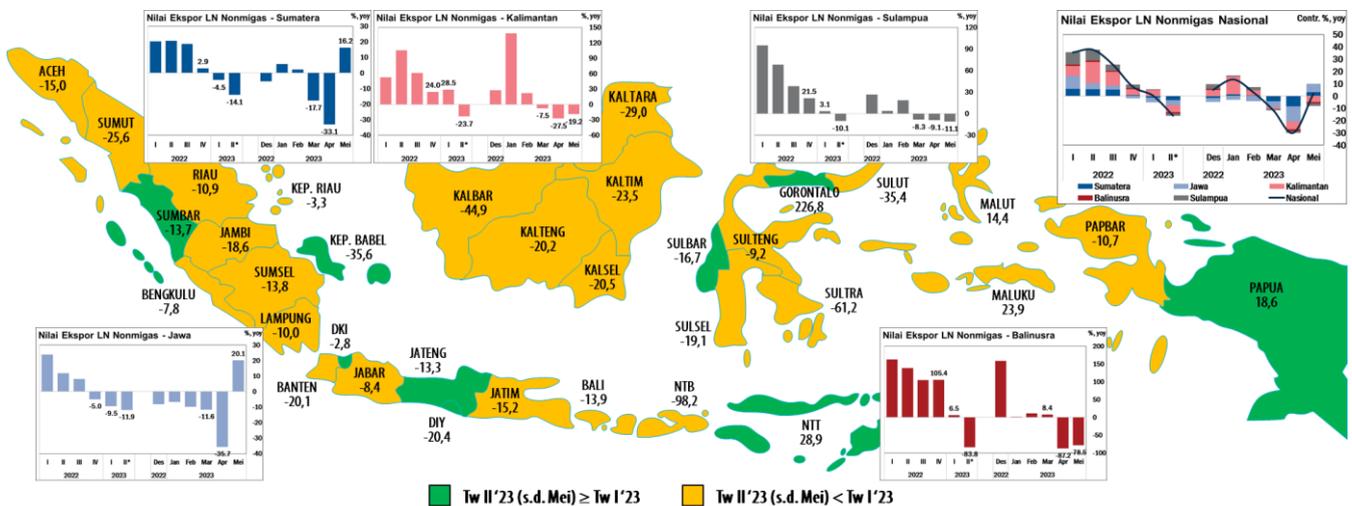
persyaratan dan aspek administratif. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat berkontribusi positif pada perbaikan reformasi desentralisasi fiskal yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Ekspor Luar Negeri

Kinerja ekspor nonmigas pada triwulan II 2023 hingga Mei tertahan di seluruh wilayah. Hal ini disebabkan oleh melemahnya permintaan eksternal seiring berlanjutnya kebijakan moneter yang ketat di negara maju dan *reopening* Tiongkok yang tidak sebesar prakiraan sebelumnya sehingga berdampak pada penurunan harga komoditas. Di Jawa, kinerja ekspor berbagai produk manufaktur melambat, antara lain mobil dan monitor. Namun, penurunan lebih dalam tertahan oleh perbaikan ekspor alas kaki dan emas perhiasan. Sejalan dengan Jawa, kinerja ekspor produk manufaktur di Sulampua turut melambat, terutama besi baja seiring dengan terbatasnya permintaan Tiongkok. Di sisi lain, kinerja ekspor nonmigas Balinusra melambat, terutama SDA berupa konsentrat tembaga. Lebih lanjut, kinerja ekspor nonmigas Sumatera dan Kalimantan turut tertahan seiring penurunan ekspor SDA, terutama batu bara. Namun, penurunan lebih dalam tertahan oleh perbaikan kinerja ekspor CPO seiring *base effect* pengalihan ekspor untuk kebutuhan domestik pada periode sebelumnya. Selain itu, perbaikan kinerja CPO juga

didukung oleh pelonggaran kebijakan ekspor yang dimulai pada 1 Mei 2023.

Secara keseluruhan tahun 2023, kinerja ekspor nonmigas di seluruh wilayah diprakirakan tetap terjaga, meskipun lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang lebih rendah seiring pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tidak sekuat prakiraan sebelumnya. Terbatasnya permintaan Tiongkok sebagai importir utama berbagai komoditas menyebabkan pelemahan pada harga komoditas di tengah aktivitas manufaktur global yang terbatas. Dengan perkembangan tersebut, kinerja ekspor produk manufaktur Jawa dan Sulampua lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Penurunan lebih dalam di Sulampua tertahan oleh perbaikan produksi bijih logam yang sebelumnya terganggu oleh *force majeure* banjir dan longsor pada awal tahun. Lebih lanjut, kendala ekspor pada triwulan II 2023 turut menahan kinerja ekspor konsentrat tembaga di Balinusra secara keseluruhan tahun. Meskipun demikian, permintaan eksternal untuk batu bara dan CPO diprakirakan tetap kuat sehingga menopang kinerja ekspor Sumatera dan Kalimantan. Dari sisi produksi, batu bara dan CPO diprakirakan masih meningkat didorong oleh cuaca yang kondusif, peningkatan kebutuhan domestik, dan permintaan eksternal yang masih kuat.



Sumber: Bea Cukai, diolah (data triwulan II 2023 s.d. Mei 2023)

Gambar II.1. Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan II 2023 (%yoy)

Kinerja sisi Lapangan Usaha

LU Pertanian

Kinerja LU Pertanian pada triwulan II 2023 diprakirakan meningkat di seluruh wilayah. Peningkatan terutama ditopang oleh kinerja subLU perkebunan, tabama, dan hortikultura. Produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit diprakirakan meningkat pada triwulan II 2023 seiring dengan berlalunya musim trek pada awal tahun, di tengah peningkatan produktivitas wilayah sentra sebagai dampak

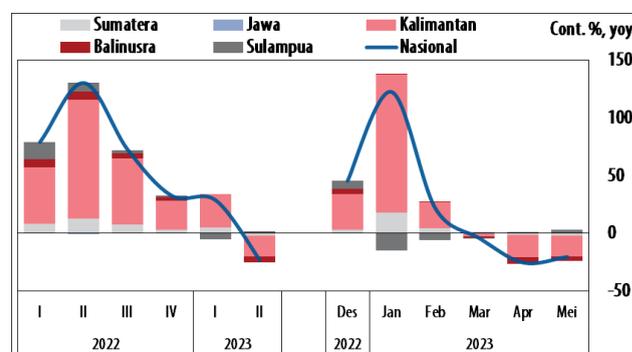
dari pertambahan luas lahan *replanting* usia produktif (Sumatera) dan pemupukan yang baik dari tahun 2022 (Kalimantan). Selain itu, peningkatan permintaan bahan baku olahan CPO terindikasi turut mendorong insentif produksi perkebunan TBS kelapa sawit (Sumatera). Produksi padi juga diprakirakan meningkat pada triwulan II 2023 didorong pergeseran puncak panen tahunan di beberapa daerah sentra di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Curah hujan yang lebih kondusif dan upaya penggunaan varietas unggul baru (VUB) turut mendukung capaian panen

padi pada triwulan II 2023. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) beras juga terindikasi meningkat dari triwulan sebelumnya di berbagai wilayah. Sementara itu, kinerja subLU hortikultura diprakirakan meningkat pada triwulan II 2023, terutama didorong oleh capaian produksi komoditas aneka cabai. Peningkatan produksi cabai bersumber dari daerah sentra Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memasuki masa panen raya pada triwulan II 2023, di tengah tingginya permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbeda dengan produksi subLU utama lainnya, produksi perikanan diprakirakan tertahan pada triwulan II 2023 dipengaruhi oleh pelemahan permintaan ekspor komoditas perikanan, kendati kondisi gelombang laut relatif lebih kondusif untuk penangkapan ikan laut.

Secara keseluruhan tahun 2023, LU Pertanian diprakirakan meningkat namun tidak setinggi prakiraan sebelumnya. Produktivitas subLU tabama dan hortikultura diprakirakan menahan kinerja LU Pertanian pada tahun 2023, dipengaruhi oleh risiko dampak El Nino terutama pada triwulan II dan III 2023. Di wilayah Jawa, capaian LU Pertanian pada 2023 diprakirakan lebih rendah sejalan dengan produksi padi dan aneka cabai yang tidak setinggi prakiraan sebelumnya dipengaruhi oleh risiko kekeringan sebagai dampak dari El Nino. Selain itu, curah hujan yang tinggi pada awal tahun juga menyebabkan capaian produksi pertanian di daerah sentra pada 2023 yang tidak setinggi prakiraan akibat fenomena puso pada komoditas padi dan serangan penyakit pada komoditas aneka cabai. Dampak kekeringan El Nino juga menahan kinerja LU Pertanian di wilayah Balinusra pada 2023, khususnya produktivitas komoditas padi selama semester II 2023. Di samping itu, peningkatan alih fungsi lahan sawah padi, terutama di Provinsi Bali turut menahan capaian produksi padi wilayah Balinusra pada 2023. Kinerja LU Pertanian wilayah Sulampua pada 2023 juga tidak setinggi prakiraan, dipengaruhi penurunan proyeksi produksi komoditas padi dan perikanan. Produksi padi Sulampua pada 2023 diprakirakan lebih rendah dipengaruhi capaian puncak panen tahunan yang tertahan tingginya curah hujan awal tahun. Sementara itu, produksi perikanan diprakirakan tidak setinggi asumsi sebelumnya karena dampak kebijakan penangkapan ikan terukur, di tengah pelemahan permintaan komoditas perikanan global. Di sisi lain, kinerja LU Pertanian di wilayah Sumatera pada 2023 masih sejalan dengan prakiraan, didorong oleh produksi TBS kelapa sawit yang tetap kuat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan *replanting* yang memasuki usia produktif. Sementara itu di Kalimantan, LU Pertanian diprakirakan meningkat di atas prakiraan sebelumnya seiring dengan peningkatan produktivitas TBS kelapa sawit, didukung oleh pemupukan yang baik pada tahun 2022.

LU Pertambangan

LU Pertambangan pada triwulan II 2023 diprakirakan tetap tumbuh kuat meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Perbaikan sarana dan prasarana produksi, cuaca yang kondusif, serta penanganan bencana yang baik mendukung terjaganya aktivitas produksi pada triwulan II 2023. Perbaikan tata niaga juga mendukung keberlangsungan aktivitas usaha korporasi pertambangan dalam memenuhi permintaan domestik, khususnya batu bara. Di sisi lain, perlambatan ekonomi global masih berlanjut, sehingga turut menahan permintaan komoditas utama pertambangan nasional yang sebagian besar berorientasi ekspor. Hal ini berdampak pada harga komoditas pertambangan yang melanjutkan penurunan sejak akhir 2022. Perkembangan tersebut mengakibatkan ekspor pertambangan nasional mengalami kontraksi pada triwulan II 2023 (Grafik II.6).

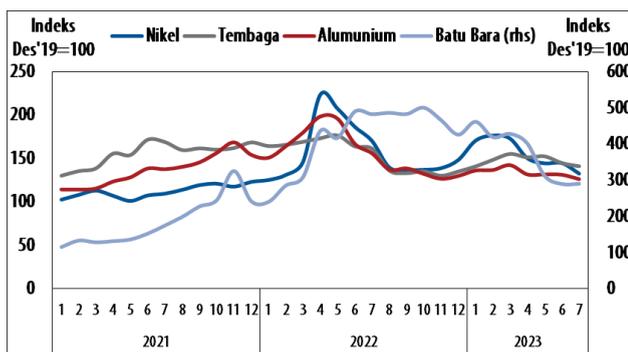


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.6. Nilai Ekspor LU Pertambangan Wilayah

Di Sulampua, kinerja LU Pertambangan pada triwulan II 2023 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama didukung oleh pemulihan aktivitas pertambangan tembaga di Papua setelah terdampak bencana banjir dan longsor pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, *maintenance* smelter di Sulawesi sedikit menahan permintaan dan produksi bijih nikel. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan wilayah lain terindikasi melambat. Di Sumatera, *lifting* migas diprakirakan tertahan terutama akibat kendala operasional di salah satu sentra produksi. Selain itu, produksi batu bara juga melambat seiring permintaan Tiongkok dan India yang tertahan. Kinerja LU Pertambangan Kalimantan turut terdampak perlambatan permintaan kedua mitra dagang utama batu bara nasional. Namun, perkembangan sisi produksi menjaga keberlangsungan produksi batu bara, antara lain meningkatnya ketersediaan alat berat dan kapal pengangkut, serta curah hujan yang relatif rendah. Di Balinusra, kinerja LU Pertambangan tertahan akibat kendala perizinan ekspor tembaga. Tertahannya ekspor berdampak pada penurunan produksi seiring kapasitas penyimpanan yang relatif terbatas.

Dinamika permintaan global turut memengaruhi kinerja LU Pertambangan sepanjang 2023, di tengah perbaikan permintaan dalam negeri. Prospek permintaan Tiongkok, yang merupakan mitra dagang utama komoditas pertambangan nasional, diperkirakan lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya. Harga komoditas juga masih menunjukkan penurunan hingga awal triwulan III 2023 (Grafik II.7). Di sisi lain, pemulihan aktivitas ekonomi dalam negeri disertai penguatan kebijakan turut mendorong produksi tetap kuat sepanjang 2023. Perbaikan sisi produksi dan kebutuhan dalam negeri yang tetap tinggi diperkirakan mendukung LU Pertambangan Kalimantan tetap kuat sejalan dengan prakiraan sebelumnya. Rencana produksi berbagai korporasi pertambangan batu bara telah disetujui, sehingga mendukung percepatan aktivitas produksi untuk memenuhi target. Kondisi cuaca serta ketersediaan sarana dan prasarana produksi diperkirakan tetap terjaga sepanjang 2023. Selain itu, permintaan domestik untuk kebutuhan pembangkit listrik diperkirakan tetap kuat, sehingga menjaga keberlangsungan usaha korporasi ke depan. Sementara itu, di Sumatera, *lifting* minyak tertahan akibat kendala teknis pengadaan infrastruktur pertambangan minyak. Selain itu, produksi batu bara juga diperkirakan lebih rendah sejalan dengan prospek ekonomi global. LU Pertambangan Balinusra juga diperkirakan tertahan, akibat penambahan kapasitas produksi yang lebih rendah, serta kendala perizinan ekspor pada triwulan II 2023. Di Sulampua, terbatasnya penambahan kapasitas produksi juga turut menahan kinerja pertambangan tembaga pada 2023. Selain itu, prospek permintaan Tiongkok yang lebih rendah diperkirakan menahan permintaan produk turunan nikel.



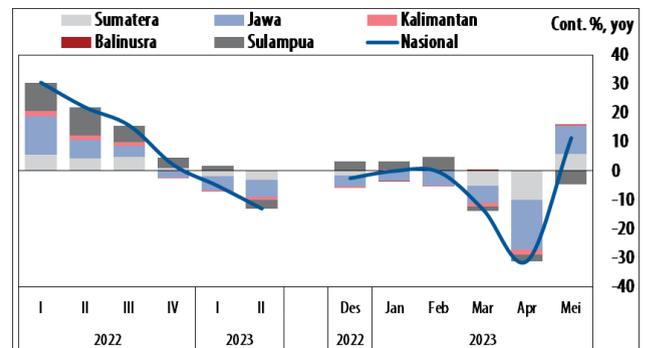
Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik II.7. Harga Acuan Komoditas Tambang Nasional

LU Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2023 tumbuh meningkat didukung oleh permintaan domestik di tengah perlambatan ekspor. Permintaan domestik menopang kinerja industri sejalan dengan peningkatan penjualan ritel, sehingga mendorong kinerja berbagai industri berorientasi domestik pada triwulan II

2023. Namun, permintaan ekspor dari mitra dagang utama melambat terutama dipengaruhi oleh prospek Tiongkok yang lebih rendah dari prakiraan, sehingga menahan pertumbuhan ekspor di sejumlah wilayah pada triwulan II 2023 (Grafik II.8).



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.8. Volume Ekspor Komoditas Industri Pengolahan Daerah

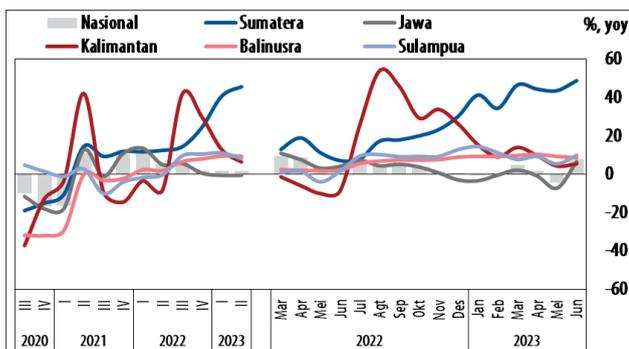
Industri makanan minuman (mamin) diperkirakan meningkat seiring peningkatan permintaan pada periode Ramadan dan HBKN. Di Sumatera dan Kalimantan, produksi CPO pada triwulan II 2023 diperkirakan tetap tumbuh meningkat seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan eksternal. Dari sisi domestik, kinerja produksi CPO diperkirakan meningkat sejalan dengan dimulainya program B35 pada Februari 2023, serta kebijakan DMO 50% untuk memastikan ketersediaan pasokan pada Februari-April 2023, serta tambahan produksi dari *replanting*. Dari sisi ekspor, volume ekspor CPO meningkat meski lebih terbatas seiring perlambatan permintaan negara mitra di tengah penurunan rasio ekspor untuk memenuhi permintaan domestik. Sementara itu, ekspor industri logam dasar khususnya logam timah Sumatera dan logam alumina Kalimantan diperkirakan tetap naik di tengah harga global yang masih rendah. Di sisi lain, kinerja LU Industri Pengolahan Sulampua pada triwulan II 2023 melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini dipicu oleh produksi *Nickel Pig Iron* (NPI) yang terbatas akibat melemahnya permintaan seiring *oversupply* NPI Tiongkok dan *maintenance* smelter. Sementara itu, LU Industri Pengolahan di Jawa terindikasi tertahan dipengaruhi oleh penurunan permintaan global. Produksi TPT dan alas kaki masih tertahan sejalan dengan penurunan permintaan mitra dagang utama, terutama dari AS dan Eropa. Selain itu, kinerja produksi industri otomotif juga lebih tertahan seiring adanya penundaan pembelian di tengah impor bahan baku yang terhambat. Dengan perkembangan tersebut, kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2023 secara agregat nasional tetap meningkat, meskipun di sebagian besar wilayah diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada 2023, permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi penopang kinerja LU Industri Pengolahan di

tengah perlambatan ekonomi global. LU Industri Pengolahan di Jawa diperkirakan tetap tumbuh, terutama pada industri berorientasi domestik, namun secara keseluruhan tumbuh lebih lambat dari prakiraan seiring permintaan mitra dagang utama yang lebih rendah. Sementara itu, LU Industri Pengolahan Sumatera juga diperkirakan lebih rendah dari prakiraan awal sejalan dengan penurunan ekspor di tengah harga komoditas yang lebih rendah. Di Sulampua, industri besi baja diperkirakan melambat seiring tambahan kapasitas produksi yang lebih terbatas. Di sisi lain, kinerja LU Industri Pengolahan Kalimantan diperkirakan tumbuh lebih baik, ditopang kinerja industri berbasis kelapa sawit, antara lain dari peningkatan permintaan domestik termasuk program B35. Selain itu, produksi diperkirakan lebih baik sejalan dengan lebih minimnya dampak kendala pemupukan dibanding perkiraan sebelumnya. Namun demikian, perkiraan fenomena El Nino menjadi salah satu faktor risiko yang perlu diantisipasi.

LU Perdagangan

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2023 diperkirakan tetap kuat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh berlanjutnya aktivitas dan mobilitas masyarakat sejalan dengan momen *festive*, yakni HBKN Idulfitri dan Iduladha yang diikuti dengan libur panjang. Bersamaan dengan hal tersebut, insentif pemerintah berupa THR dan gaji ke-13 mendorong daya beli masyarakat pada periode ini sehingga berkontribusi positif pada permintaan perdagangan ritel. Prospek kinerja LU Perdagangan yang membaik ini juga terpantau dari indikator penjualan eceran pada triwulan II 2023 yang tercatat meningkat di sebagian besar wilayah (Grafik II.9). Selain itu, kinerja LU Perdagangan diperkirakan tumbuh sejalan dengan masih kuatnya keyakinan konsumen, terutama di wilayah Jawa. Lebih lanjut, prospek realisasi LU Perdagangan pada periode berjalan juga diperkirakan lebih baik seiring realisasi PMI dan impor yang tinggi di tengah penurunan prakiraan penjualan kendaraan bermotor.



Sumber: Bank Indonesia

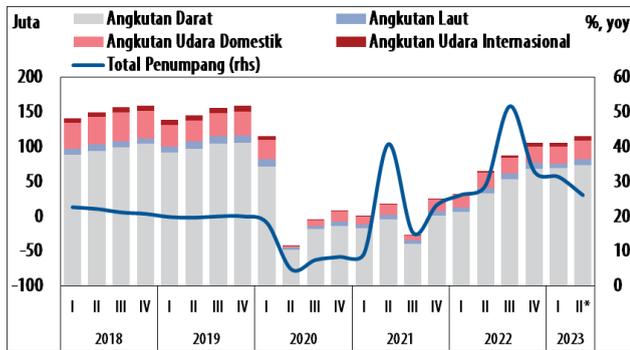
Grafik II.9. Indeks Riil Penjualan Eceran

Secara keseluruhan 2023, kinerja LU Perdagangan sesuai prakiraan sebelumnya. Tetap terjaganya permintaan domestik di tengah tertahannya kinerja eksternal menopang prospek LU Perdagangan. Kinerja LU Perdagangan yang mampu bertahan baik ini terkonfirmasi dari perkembangan penjualan ritel dan kunjungan pusat belanja di tengah kenaikan DPK di seluruh wilayah yang ditopang oleh deposito. Kinerja LU Perdagangan juga diperkirakan turut didorong oleh dampak positif penyelenggaraan Pemilu yang disertai safari politik menjelang akhir tahun, sehingga akan mengakselerasi mobilitas dan konsumsi masyarakat. Di samping itu, mulai menurunnya harga avtur dan solar yang berdampak pada penyesuaian tarif angkutan pada beberapa moda transportasi, penambahan hari cuti bersama oleh Pemerintah Pusat, peningkatan aktivitas wisatawan nusantara (wisnus), serta penyelenggaraan *event* MICE yang terus bertambah, diperkirakan mendorong perbaikan LU Perdagangan hingga akhir tahun. Kendati demikian, faktor risiko perlambatan ekonomi global masih menjadi faktor penahan perbaikan LU perdagangan secara lebih lanjut.

LU Transportasi dan Pergudangan

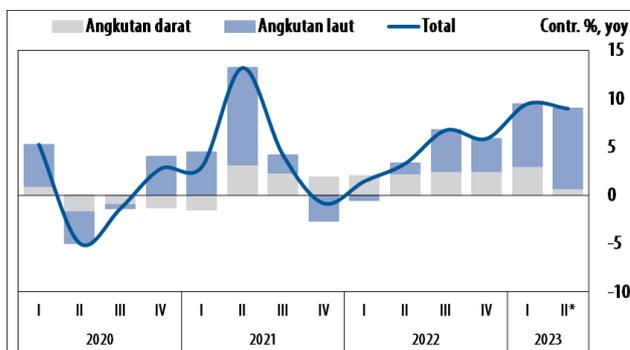
Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan II 2023 diperkirakan tetap tumbuh tinggi, meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Penurunan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) tercermin dari pertumbuhan jumlah penumpang dan transportasi barang yang melambat seiring dengan pembatasan operasional selama HBKN lebaran dan mulai tertahannya perdagangan internasional (Grafik II.10 dan Grafik II.11). Di Sumatera, jumlah penumpang diperkirakan tertahan akibat pembatasan arus logistik, peningkatan tarif Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS), dan pembatasan pembelian solar bersubsidi. Lebih lanjut, pertumbuhan volume bongkar muat barang juga diperkirakan menurun seiring dengan pelemahan kinerja perdagangan eksternal. Di Sulampua, kinerja LU Transgud diperkirakan masih melambat sejalan dengan realisasi keberangkatan dan kedatangan penumpang angkutan udara pada triwulan II 2023 yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya meskipun terdapat penambahan hari libur dan jalur penerbangan. Lebih lanjut, angkutan barang dan penumpang untuk transportasi laut juga tercatat masih menurun hingga April 2023 dibandingkan dengan triwulan I 2023. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja LU Transgud di Balinusra pun diperkirakan melambat karena *base effect* yang disebabkan oleh tingginya aktivitas transportasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, harga tiket pesawat yang meningkat pada periode HBKN Idulfitri dan Iduladha, serta normalisasi *traffic* MICE. Lebih lanjut, LU Transgud di Kalimantan pun diperkirakan menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain,

kinerja LU Transgud di Jawa diprakirakan sedikit meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pemudik karena faktor *seasonal* momen HBKN Idulfitri pada April 2023 dan turunnya harga BBM nonsubsidi.



Sumber: BPS

Grafik II.10. Jumlah Penumpang berdasarkan Moda Transportasi s.d Mei 2023



Sumber: BPS

Grafik II.11. Pertumbuhan Transportasi Barang berdasarkan Moda Transportasi s.d Mei 2023

Secara keseluruhan 2023, sejalan dengan proyeksi sebelumnya, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tetap kuat, meski diprakirakan menurun. Hal ini disebabkan oleh normalisasi pertumbuhan LU Transgud setelah tumbuh tinggi pada 2022. Lebih lanjut, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga berpotensi menahan kinerja perdagangan serta perjalanan internasional. Namun demikian, proyeksi perlambatan LU Transgud di Sumatera, Kalimantan dan Balinusra diprakirakan tidak sedalam proyeksi sebelumnya. Perlambatan lebih dalam di Sumatera diprakirakan tertahan oleh perbaikan kinerja LU Transgud pada triwulan II dan III karena peningkatan MICE serta potensi penurunan harga tiket pesawat. Sementara itu di Kalimantan, perlambatan lebih dalam tertahan oleh mobilitas masyarakat dan pembangunan IKN yang diprakirakan akan semakin masif sepanjang 2023. Lebih lanjut, penambahan rute dan maskapai *direct flight* yang mencapai 36 *flight* di Balinusra juga mendorong terjadinya perbaikan dan menahan perlambatan LU Transgud.

Di sisi lain, kinerja LU Transgud di Sulampua diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya

seiring dengan penambahan penerbangan yang belum diikuti oleh penambahan jumlah penumpang angkutan udara hingga pertengahan tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, penurunan kinerja LU Transgud di Jawa juga diprakirakan lebih dalam dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan aktivitas logistik perdagangan eksternal yang diprakirakan menurun sebagai dampak dari berlanjutnya penurunan permintaan mitra dagang utama.

LU Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum (Akmamin)

Kinerja LU Akmamin pada triwulan II 2023 diprakirakan melambat dibandingkan dengan triwulan I 2023.

Prospek LU Akmamin pada triwulan II 2023 tersebut didukung oleh adanya penyelenggaraan berbagai *event* internasional seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Di samping itu, kebijakan penambahan jumlah hari cuti bersama selama momen Iduladha juga turut mendukung proyeksi kinerja LU Akmamin pada triwulan II 2023 dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Pembukaan rute penerbangan *direct flight* internasional baru ke destinasi wisata juga diprakirakan dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan LU Penyediaan Akmamin pada triwulan laporan. Meski demikian, kapasitas angkutan udara yang masih terbatas menjadi faktor penahan LU Akmamin secara lebih lanjut pada periode ini. Peningkatan proyeksi LU Akmamin pada triwulan II 2023 ditandai oleh indikator tingkat okupansi hotel di sejumlah kota besar yang telah berada di atas level prapandemi selama HBKN. Indikator lainnya yang turut mendorong perbaikan ialah jumlah kedatangan domestik serta tingginya transaksi *off-us* pada hotel dan restoran yang menandakan peningkatan volume transaksi.

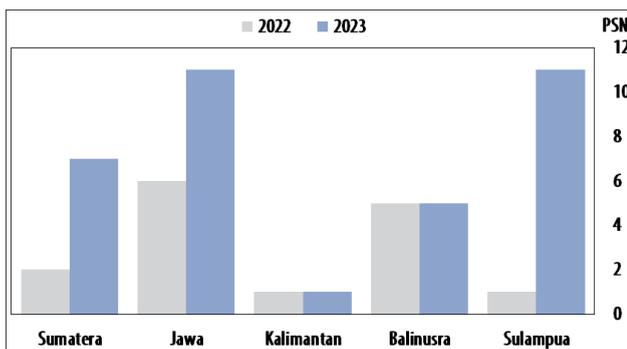
Secara keseluruhan tahun 2023, kinerja LU Akmamin diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

Membbaiknya prakiraan LU Akmamin 2023 didukung oleh peningkatan jumlah perhelatan *event* bertaraf nasional maupun internasional yang juga diprakirakan akan diikuti oleh peningkatan wisatawan mancanegara (*wisman*) dan wisatawan nusantara (*wisnus*). *Event* tersebut antara lain ialah rangkaian konser musisi dunia yang akan diselenggarakan di Jakarta, Prambanan Jazz Festival di Yogyakarta, FIFA U-17 di Jakarta, serta MotoGP 2023 di Mandalika. Selain itu, potensi peningkatan kunjungan *wisman* di destinasi wisata, khususnya Balinusra, diprakirakan akan terakselerasi karena pencabutan status pandemi global seiring dengan dimulainya pembukaan *border* dari Tiongkok yang mendorong lonjakan *wisman* asal negara tersebut. Di samping itu, potensi peningkatan *wisman* di Balinusra juga didukung oleh peningkatan kunjungan *wisman* asal India yang menggunakan *chartered flight* dan adanya rencana pembukaan *direct flight* rutin

sejak Oktober 2023. Di samping itu, pembukaan rute *direct* Dubai - Bali dengan menggunakan pesawat *double decker* juga diharapkan dapat menopang kinerja LU Akmamin tahun 2023. Ke depan, kinerja LU Akmamin akan turut didukung oleh prospek peningkatan *length of stay* bagi wisman, sejalan dengan pengembangan *quality tourism*. Di sisi domestik, berbagai langkah untuk mendorong mobilitas wisnus termasuk melalui Gerakan Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI) serta dampak positif safari politik di Jawa juga akan menopang perbaikan LU Akmamin secara lebih lanjut.

LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi diperkirakan meningkat pada triwulan II 2023 didorong berlanjutnya penyelesaian PSN di beberapa wilayah. Peningkatan tersebut terindikasi dari menguatnya kinerja penjualan semen dan impor barang konstruksi pada akhir triwulan II 2023. Secara spasial, peningkatan kinerja LU Konstruksi ditopang oleh wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulampua. Penyelesaian sejumlah PSN konektivitas berlanjut di Sumatera dan Jawa, diantaranya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo, LRT Jabodetabek, serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Di samping itu, pembangunan sejumlah PSN kawasan industri di Sulampua juga turut mendorong peningkatan kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2023, yakni antara lain Kawasan Industri Pomalao dan Kawasan Industri Terpadu Kendari. Berbagai proyek swasta juga turut mendorong perbaikan kinerja ketiga wilayah, antara lain smelter nikel dan pabrik *electric vehicle* di Jawa, serta smelter nikel di Sulampua. Sementara itu, kinerja LU Konstruksi di Balinusra dan Kalimantan diperkirakan tetap kuat meskipun melambat. Di Balinusra, meskipun jumlah proyek baru Pemerintah pada triwulan II 2023 lebih terbatas, namun berbagai proyek revitalisasi infrastruktur pariwisata masih berlangsung dan menjaga kinerja LU Konstruksi tetap kuat. Di Kalimantan, kinerja LU Konstruksi diperkirakan tetap tumbuh tinggi, ditopang oleh berlanjutnya proyek sejumlah infrastruktur perkantoran dan jalan tol Ibu Kota Negara (IKN), serta proyek kawasan tambang batu bara swasta yang dimulai pada triwulan II 2023.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.12. Jumlah PSN Selesai pada Tahun 2023

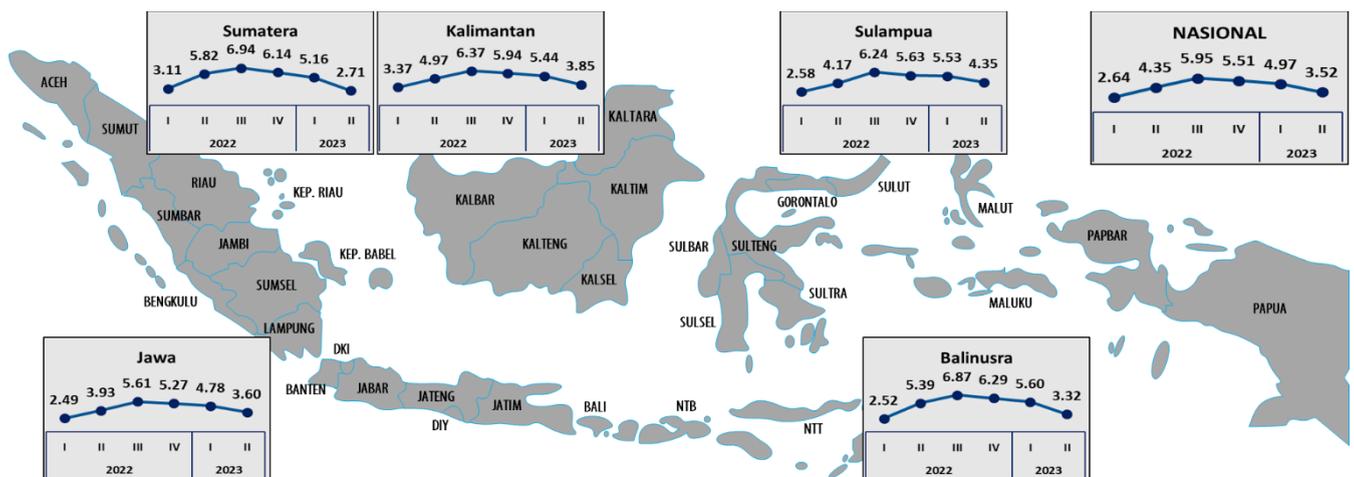
Kinerja LU Konstruksi keseluruhan 2023 diperkirakan sejalan dengan prakiraan sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh berlanjutnya realisasi PSN di seluruh wilayah, di samping percepatan penyelesaian beberapa PSN *carryover* dari tahun 2022 di beberapa daerah dan kinerja swasta yang tetap kuat (Grafik II.12). Curah hujan yang diperkirakan lebih rendah juga mendukung kelancaran aktivitas konstruksi di berbagai daerah. Di Sumatera, kinerja LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya konstruksi sebagian besar ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang masih sejalan prakiraan dan akan memasuki tahap kedua pada semester II 2023. Selain itu, pembangunan irigasi dan infrastruktur pendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara turut menopang kinerja LU Konstruksi. Pembangunan sejumlah PSN konektivitas dan irigasi menopang kinerja LU Konstruksi di wilayah Jawa, di samping proyek swasta khususnya di sektor properti residensial. Realisasi PSN di Jawa pada tahun 2023 diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya sejalan kinerja sebagian besar proyek yang masih sesuai target. Sementara itu, kinerja LU Konstruksi wilayah Kalimantan diperkirakan meningkat sejalan prakiraan didorong oleh berlanjutnya pengerjaan sejumlah PSN, yakni Ibu Kota Negara (IKN), *Refinery Development Masterplan Program* (RDMP) Balikpapan, serta Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIH). Pembangunan infrastruktur konektivitas dan irigasi, serta beberapa proyek swasta di bidang industri pengolahan turut mendukung prospek LU Konstruksi di wilayah Kalimantan. Realisasi PSN terkait infrastruktur industri pengolahan dan energi menopang kinerja LU Konstruksi di wilayah Sulampua, antara lain Kawasan Industri Bantaeng dan Kilang LNG Abadi Masela yang masih sesuai target. Selain itu, capaian sejumlah PSN konektivitas seperti Pelabuhan Likupang dan Makassar *New Port* yang sejalan prakiraan turut menopang kinerja konstruksi di Sulampua. Di Balinusra, kinerja LU Konstruksi didorong oleh PSN infrastruktur bendungan dan sejumlah proyek strategis pariwisata seperti pengembangan Mandalika *Urban Tourism* serta revitalisasi kawasan pariwisata yang sebagian besar sesuai target. Di tengah prospek perbaikan kinerja LU Konstruksi, kendala pembebasan lahan dan perizinan berisiko menghambat capaian beberapa PSN di berbagai wilayah. Selain itu, prospek kinerja properti residensial juga masih dapat dioptimalkan untuk mendukung kinerja LU Konstruksi lebih lanjut. Berbagai tantangan dan dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendorong kinerja LU Konstruksi, khususnya properti residensial, akan diulas lebih lanjut pada Bagian 3 Isu Strategis: Strategi Daya Ungkit Mendorong Perekonomian Nasional.

Inflasi Daerah

Inflasi gabungan kota IHK di seluruh wilayah Indonesia menurun pada triwulan II 2023 sejalan dengan

perkembangan inflasi nasional. Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan II 2023 adalah sebesar 3,52% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2023 yang sebesar 4,97% (yoy). Penurunan tekanan inflasi gabungan kota IHK terjadi di seluruh wilayah, sehingga inflasi IHK nasional kembali berada dalam rentang sasaran sebesar 3,0%±1%. Realisasi inflasi gabungan kota IHK terendah berada di wilayah Sumatera dan Balinusra masing-masing sebesar 2,71% (yoy) dan 3,32% (yoy). Sementara itu, inflasi gabungan kota IHK tertinggi dan di atas sasaran inflasi berada di wilayah Sulampua sebesar 4,35% (yoy). Selain itu, disparitas inflasi antarprovinsi melebar jika dibandingkan dengan triwulan lalu, dengan inflasi gabungan kota IHK tertinggi di Provinsi Maluku sebesar 6,07% (yoy) dan terendah di Provinsi Jambi sebesar 1,96% (yoy). Realisasi inflasi yang lebih rendah pada triwulan II 2023 disumbang oleh penurunan kelompok inti, *administered prices* (AP) dan *volatile food* (VF) dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi yang terkendali, penurunan tekanan harga komoditas global, kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan penurunan tarif AU, serta pasokan pangan strategis yang terjaga didukung oleh sinergi pengendalian inflasi pangan.

Inflasi kelompok inti terjaga pada triwulan II 2023 sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali dan penurunan tekanan harga komoditas global. Inflasi inti yang lebih rendah pada triwulan II 2023 didorong oleh ekspektasi inflasi yang tetap terkendali sejalan dengan kebijakan moneter dan berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan komoditasnya, penurunan inflasi inti disumbang terutama oleh andil inflasi kue kering berminyak, sabun detergen bubuk/cair dan sabun cair/cuci piring yang menurun dibandingkan dengan triwulan I 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh: (i) telah berakhirnya periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap kue kering berminyak; dan (ii) penurunan harga *crude palm oil* (CPO) yang merupakan bahan baku kue kering berminyak dan aneka sabun. Sementara itu, tekanan inflasi inti yang lebih rendah tertahan oleh kenaikan andil inflasi komoditas emas perhiasan (Sulampua, Balinusra, Kalimantan dan Jawa) dan kontrak rumah (Jawa).



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.2. Peta Inflasi Gabungan Kota dalam Provinsi dan Wilayah, Triwulan II 2023 (%yoy)

Inflasi kelompok VF triwulan II 2023 di seluruh wilayah menurun dari triwulan I 2023 seiring dengan terjaganya pasokan pangan strategis. Dari sisi komoditas, inflasi VF yang lebih rendah didorong terutama oleh penurunan andil inflasi aneka cabai, minyak goreng dan bawang merah di seluruh wilayah. Penurunan andil inflasi aneka cabai didorong oleh peningkatan pasokan seiring dengan berlangsungnya musim panen di berbagai sentra produksi. Sementara itu, andil inflasi minyak goreng yang menurun didukung oleh terjaganya pasokan seiring dengan realisasi *Domestic Market Obligation* (DMO) dan harga bahan baku CPO yang melandai. Penurunan andil inflasi bawang merah didukung oleh pasokan yang mencukupi seiring dengan musim panen yang berlangsung di beberapa daerah. Secara

nasional, penurunan tekanan inflasi VF lebih lanjut turut didukung oleh komitmen serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia serta mitra strategis lainnya dalam pengendalian harga pangan melalui TPIP, TPID dan pelaksanaan GNPIP.

Inflasi kelompok AP menurun di seluruh wilayah didorong oleh penyesuaian harga BBM khususnya bensin nonsubsidi dan penurunan tarif AU. Komoditas utama yang mengalami penurunan andil inflasi terbesar antara lain ialah bensin, tarif AU dan bahan bakar rumah tangga (BBRT). Penurunan andil inflasi bensin pada periode laporan disebabkan oleh penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya bensin nonsubsidi, pada Juni

2023. Penurunan andil inflasi tarif AU didukung oleh penurunan tarif tiket khususnya oleh maskapai *low-cost carrier* (LCC) untuk memenuhi keterisian kursi penumpang (*seat load factor*). Sementara itu, andil inflasi BBRT pada periode laporan yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya disebabkan oleh *base effect* setelah penyesuaian harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) nonsubsidi tahun lalu dan harga LPG di tingkat pengecer yang terjaga.

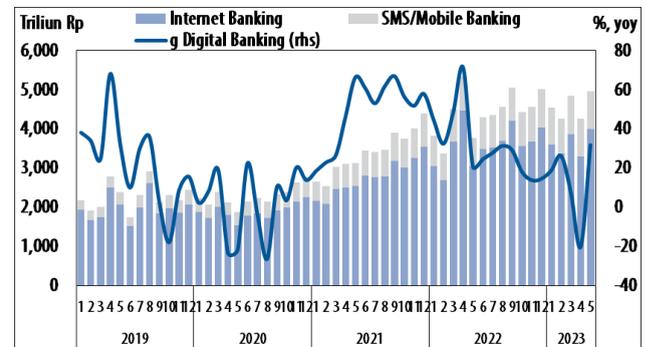
Prospek inflasi IHK dan inti pada 2023 diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,0%±1%. Tekanan inflasi diperkirakan stabil dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2023 sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, harga komoditas global yang menurun, dan nilai tukar yang tetap terjaga. Meskipun demikian, terdapat potensi risiko kenaikan inflasi VF akibat gangguan cuaca (*El Nino*).

Bank Indonesia bersama Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta mitra strategis lainnya berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi. Sinergi antarpihak dalam TPIP-TPID dan GNPIP melalui strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif akan terus diperkuat pelaksanaannya di seluruh wilayah dan terus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di masing-masing wilayah. Ke depan, penguatan strategi 4K dalam TPIP-TPID dan GNPIP tersebut diharapkan dapat memitigasi risiko kenaikan inflasi VF, serta memastikan inflasi IHK dan inti tetap terkendali dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Ekonomi dan keuangan digital tetap kuat pada triwulan II 2023, sejalan dengan terjaganya sistem pembayaran digital selama periode HBKN Idul Fitri. Hal ini tercermin dari transaksi *digital banking* yang tumbuh positif sebesar 1,4% (nom, yoy) pada triwulan II 2023¹ (Grafik II.13). Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, serta kemudahan dan akselerasi pada *digital banking*. Sejalan dengan kondisi tersebut, nilai transaksi melalui Uang Elektronik (UE) pada triwulan II 2023² tumbuh sebesar 78,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 84,8% (yoy). Sementara itu, nilai transaksi melalui Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu ATM/Debit, tumbuh sebesar 1,0% (yoy)³ setelah pada periode sebelumnya terkontraksi sebesar 1,1% (yoy). Adapun transaksi ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II

2023 secara nominal mengalami kontraksi sebesar 8,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar 1,1% (yoy). Sementara itu, transaksi nilai besar melalui Sistem BI *Real Time Gross Settlement* (RTGS) turut terkontraksi sebesar 28,8% (yoy), menguat dari pertumbuhan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 29,4% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia

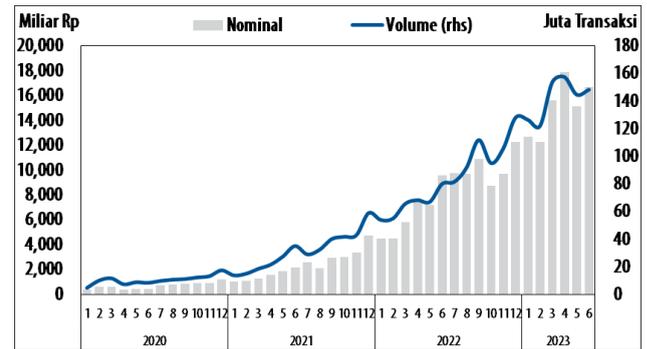
Grafik II.13. Transaksi Digital Banking

Bank Indonesia terus mengakselerasi akseptasi QRIS yang masih terus tumbuh secara signifikan. Akselerasi akseptasi QRIS tersebut terlihat dari peningkatan transaksi QRIS secara nominal maupun volume sampai dengan triwulan II 2023 (Grafik II.14) dengan total volume sebesar 148,3 juta transaksi dan nominal sebesar Rp 16,7 T pada Juni 2023. Untuk semakin mengakselerasi akseptasi QRIS, Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) pada Mei 2023 meresmikan implementasi interkoneksi pembayaran antara Indonesia dengan Malaysia menggunakan QR Code. Peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari fase uji coba yang telah sukses dilakukan sejak Januari 2022. Terhubungnya pembayaran QR lintas negara antara Indonesia dan Malaysia merupakan bukti nyata penguatan kerja sama dalam kerangka *Regional Payment Connectivity* (RPC) untuk mendorong pembayaran lintas negara yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Interkoneksi ini juga sejalan dengan inisiatif G20 dalam mengembangkan Peta Jalan Penguatan Pembayaran Lintas Batas, sekaligus menjadi sebuah capaian yang signifikan dari Ketekuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, serta menjadi *milestone* implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna layanan transaksi pembayaran lintas batas, sekaligus menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital di kawasan, serta mendukung stabilitas makroekonomi dengan mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas untuk transaksi bilateral.

¹ Periode data s.d. Mei 2023

Sementara itu, di sisi uang tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) hingga triwulan II 2023 tercatat tumbuh sebesar 3,9% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,8% (yoy). Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya menjelang HBKN dan cuti bersama Idul Adha. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah menyiapkan uang tunai untuk mencukupi kebutuhan nasional sebesar Rp93 triliun sesuai proyeksi angka kebutuhan uang pada bulan Juni-Juli 2023 yang naik sebesar 11,3% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga turut melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengedarkan uang tunai, diantaranya

dengan perbankan daerah dan TNI Angkatan Laut (AL) dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang tunai untuk wilayah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.14. Transaksi QRIS

BAGIAN 3

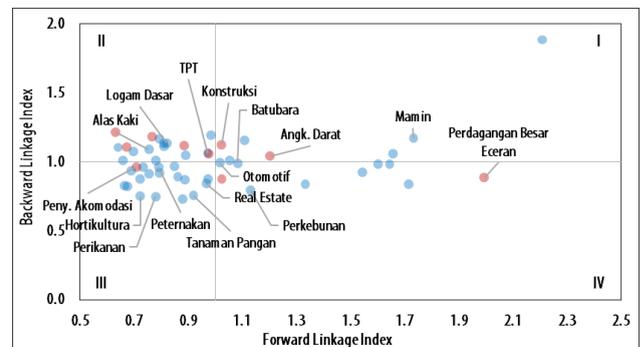
Isu Strategis: Strategi Daya Ungkit Mendorong Perekonomian Nasional

Pendahuluan

Pertumbuhan PDB triwulan I 2023 tetap kuat dan menunjukkan momentum pemulihan ekonomi yang terus berlanjut di tengah mengemukanya sejumlah tantangan. PDB mampu tumbuh lebih tinggi dari prakiraan, namun konsumsi rumah tangga tumbuh belum sekuat prakiraan karena lebih ditopang oleh *contact intensive sectors* sehingga memengaruhi kecepatan pemulihan ekonomi. Berdasarkan analisis dengan melakukan analisis *backward* dan *forward linkages* dengan menggunakan Tabel *Input Output (IO)*² 2016, *linkage* dari *contact intensive sectors* tidak sebesar sektor lain (Grafik III.1). Dampak pengganda *contact intensive sectors*, yaitu LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud), LU Perdagangan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) lebih terbatas. Berdasarkan subsektor, hanya subsektor Perdagangan Besar dan Eceran serta subsektor Angkutan Darat yang memiliki keterkaitan cukup besar (FL dan BL *index* >1). Selain itu, *contact intensive sectors* secara umum berorientasi domestik sejalan dengan *output* untuk domestik yang cukup tinggi, yaitu sekitar 84-96% (kecuali subLU Penyediaan Akomodasi). *Imported input* dari *contact intensive sectors* ini juga tergolong rendah (kecuali LU Transgud) sehingga eksposur terhadap *shock* eksternal lebih rendah (Grafik III.2). Dari sisi tenaga kerja, peran sektor ini cukup besar dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lain, yaitu sekitar 30%, kendati didominasi tenaga kerja informal. Sementara itu, stabilitas makro terjaga tercermin dari inflasi yang menurun meskipun masih terdapat disparitas antar pasokan dan antar daerah yang memengaruhi ketahanan pangan nasional.

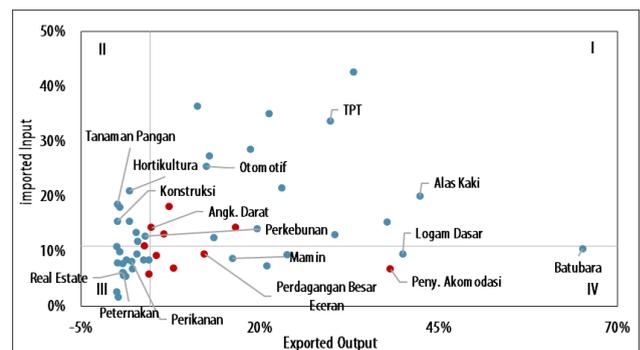
Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih *broad based*. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan *extra effort* yang difokuskan pada sektor prioritas dengan mempertimbangkan struktur ekonomi. Sektor prioritas merupakan sektor yang ditetapkan sebagai fokus bagi implementasi suatu kebijakan. Sektor prioritas ini pernah dirumuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi dan menjadi dasar paket kebijakan terpadu di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada

Februari 2021. Untuk mendukung upaya secara lebih *broad based*, dilakukan penguatan terhadap pemetaan sektor prioritas yang sekaligus diharapkan dapat berperan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan dua dimensi. Dimensi pertama, yaitu melihat dampak ekonomi yang digambarkan dengan tingkat *multiplier* kepada *output*, nilai tambah, dan tenaga kerja pada sektor ekonomi yang dihitung dari *Interregional Input Output (IRIO)* 2015. Dimensi kedua, yaitu tren PDB dengan melihat gap kinerja pertumbuhan sektor ekonomi triwulan I 2023 dibandingkan terhadap rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi dalam 5 tahun terakhir.



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.1. Backward dan Forward Linkage Berdasarkan Subsektor



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.2. Exported Output dan Imported Input Berdasarkan Subsektor

Dari hasil *updating* pemetaan sektor prioritas tersebut, upaya mendorong pertumbuhan secara lebih *broad based* dapat difokuskan pada sejumlah sektor utama, di antaranya sektor Pertanian dan sektor Konstruksi. Sektor tersebut, di antaranya mencakup subsektor-

² Matriks yang menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antarsektor dalam perekonomian di Indonesia secara menyeluruh

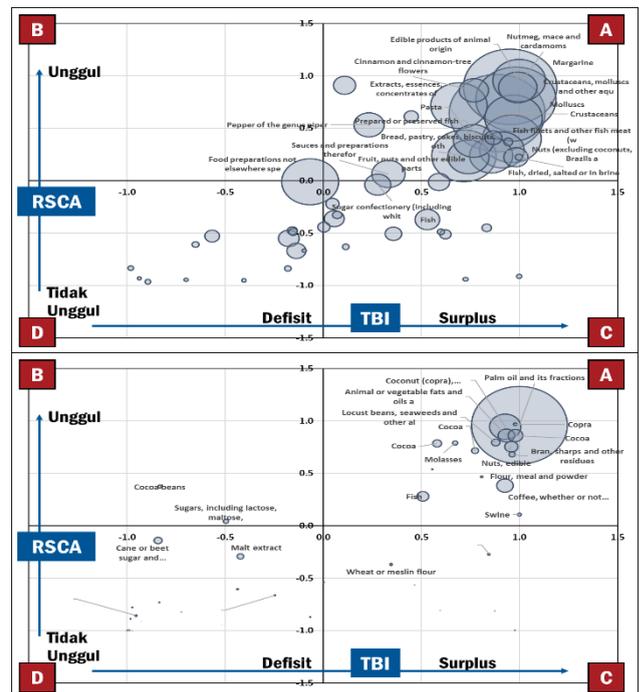
subsektor di LU Pertanian, LU Konstruksi, subsektor industri makanan minuman (mamin), dan subsektor industri logam dasar. Subsektor di LU Pertanian seperti Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan dapat beralih menjadi subsektor industri mamin yang memiliki keterkaitan dan dampak ekonomi yang lebih besar. Hilirisasi ini perlu diperkuat dengan koordinasi bersama K/L terkait guna meningkatkan peran dari subsektor-subsektor tersebut dalam menjaga stabilitas inflasi, mendorong pertumbuhan secara *broad based* untuk kembali menuju tren jangka panjangnya, serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, sektor konstruksi menghadapi tantangan sejalan kinerja investasi bangunan yang masih dalam tren melambat khususnya proyek swasta. Hal ini juga terindikasi dari kinerja sektor properti residensial di seluruh wilayah yang masih tertahan.

Strategi Daya Ungkit Perekonomian Nasional: Hilirisasi Pangan

Hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung peningkatan nilai tambah. Secara umum, hilirisasi SDA mendorong kontribusi industri logam tetap kuat dalam struktur industri nasional, bahkan selama pandemi COVID-19. Pengembangan hilirisasi dititikberatkan pada 4 (empat) komoditas utama, yakni nikel, timah, tembaga, dan bauksit. Secara umum, Indonesia memiliki keunggulan yang cukup signifikan dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut didukung oleh tingkat produksi yang tinggi, didukung oleh cadangan SDA yang terbilang cukup melimpah. Untuk mendorong hilirisasi SDA tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis. Bahkan, arah kebijakan hilirisasi ke depan akan diperkuat melalui kebijakan tata kelola mineral.

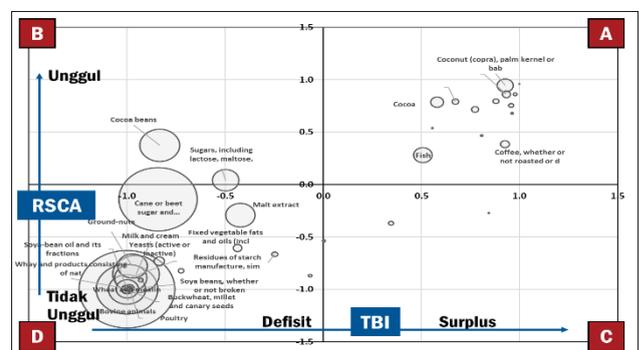
Di tengah keberhasilan hilirisasi SDA dalam menopang pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi, hilirisasi berpotensi untuk terus diperluas terutama hilirisasi pangan. Perluasan strategi hilirisasi SDA ke pangan tidak hanya untuk mendukung surplus transaksi berjalan, tapi juga untuk mendukung stabilitas ekonomi, serta turut berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih inklusif. Perluasan hilirisasi didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, berdasarkan *revisiting* sektor prioritas sebelumnya, hilirisasi pada komoditas pangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan secara lebih *broad based*, mengingat *linkage* industri hilir pangan yang cukup besar kepada perekonomian. Kedua, hilirisasi pangan dalam jangka pendek juga perlu diarahkan untuk mendukung stabilitas inflasi mengingat sebagian komoditas pangan menjadi sumber inflasi yang cukup signifikan.

Ketiga, industri hilir pangan juga berkontribusi positif dalam menopang surplus neraca perdagangan, baik melalui potensi ekspor produk berdaya saing tinggi (Grafik III.3) maupun melalui potensi substitusi impor (Grafik III.4) yang dapat terus dioptimalkan melalui peningkatan nilai tambah produk turunan. Keempat, hilirisasi SDA yang tengah berjalan diharapkan dapat mendukung penyerapan tenaga kerja agar pertumbuhan dapat lebih inklusif. Namun, tingkat serapan tenaga kerja manufaktur di sejumlah provinsi sentra hilirisasi mineral belum setinggi di provinsi lain. Hal ini berisiko membatasi potensi *spillover* positif dari dampak hilirisasi mineral kepada perekonomian domestik, di tengah urgensi untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi.



Sumber: WITS, Bea Cukai, diolah

Grafik III.3. Pemetaan Daya Saing dan Neraca Perdagangan Produk Ekspor Industri Makanan Minuman Indonesia



Sumber: WITS, Bea Cukai, diolah

Grafik III.4. Pemetaan Daya Saing dan Neraca Perdagangan Produk Impor Industri Makanan Minuman Indonesia

Pengembangan hilirisasi pangan ini juga menjadi komitmen dan arah kebijakan dari Pemerintah dalam jangka menengah. Sejumlah Kementerian maupun

Lembaga terkait telah memberikan fokus perhatian pada upaya pengembangan nilai tambah produk pangan, antara lain Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Gambar III.1). Dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, upaya hilirisasi produk pangan yang dilakukan Kemenperin menyasar setidaknya pada lima komoditas utama, yakni gandum, susu, teh, kopi, dan gula. Sementara itu, strategi hilirisasi pangan oleh Kementan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menitikberatkan pada lima komoditas, yaitu kopi, sarang burung walet, jambu mete, porang, dan kelapa. Di BKPM, hilirisasi pangan didorong melalui strategi penguatan investasi pada beberapa produk strategis, antara lain kelapa, garam, rajungan, udang, rumput laut, kelapa sawit, serta perikanan. Melengkapi kebijakan hilirisasi lainnya, Kementerian BUMN tengah berfokus pada pengembangan hilirisasi produk beras, daging, perikanan, kelapa sawit, dan gula. Di Kemenkomarves dan KKP, pengembangan komoditas pangan masing-masing difokuskan pada ikan, rumput laut; dan ikan, rumput laut, rajungan, serta udang.

Untuk mendukung percepatan hilirisasi pangan nasional, Bank Indonesia memformulasikan pendekatan *three-pronged approach downstream strategy*. Strategi tersebut membidik tiga target utama, yaitu (i) menjaga stabilitas inflasi; (ii) menjaga stabilitas eksternal; serta (iii) mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif (Gambar III.2). Pengembangan hilirisasi pangan untuk menjaga kestabilan harga dalam negeri difokuskan di jangka pendek. Selain mendukung stabilitas harga, hilirisasi diarahkan pula untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi regional melalui pemilihan komoditas unggulan daerah. Sementara itu, upaya mendorong stabilitas eksternal diarahkan memperbaiki neraca transaksi berjalan yang dititikberatkan pada dua indikator utama, yakni mendorong peningkatan produk ekspor bernilai tambah tinggi dan substitusi impor. Selanjutnya, strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif tercermin melalui peningkatan serapan tenaga kerja di berbagai wilayah.

Berdasarkan pendekatan tersebut, pemetaan prioritas hilirisasi pangan dapat dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria pokok. Pemetaan potensi pengembangan komoditas hilirisasi pangan dilakukan melalui sejumlah tahapan berdasarkan sejumlah kriteria dasar sebagai landasan dalam mengidentifikasi strategi kebijakan pengembangannya. Kriteria dasar tersebut terdiri dari empat indikator utama yang meliputi sektor prioritas yang menjadi daya ungkit, tingkat inflasi, tingkat daya saing, dan serapan tenaga kerja. Berdasarkan identifikasi sektor prioritas, penentuan fokus komoditas diarahkan pada subsektor ekonomi yang memiliki daya ungkit perekonomian. Sementara itu, kriteria inflasi mempertimbangkan rata-rata tingkat inflasi, volatilitas inflasi, serta kontribusi inflasi. Potensi perluasan cakupan serapan tenaga kerja menjadi indikator utama lainnya dalam penentuan produk prioritas tersebut. Parameter terakhir yang digunakan ialah perkembangan daya saing produk, yang dinilai melalui metode *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA) serta *Trade Balance Index* (TBI).³

Berdasarkan kriteria yang digunakan, hilirisasi dapat difokuskan pada tujuh komoditas pangan. Ketujuh komoditas pangan tersebut meliputi kelapa sawit, perikanan, rumput laut, tebu, beras, aneka cabai, dan bawang merah. Berdasarkan pentahapannya, hilirisasi pada bawang merah, beras dan aneka cabai menjadi prioritas jangka pendek dengan fokus utama pada perbaikan tingkat inflasi terlebih dahulu sebelum menuju tahapan hilirisasi lebih lanjut. Sementara itu, komoditas ikan menjadi prioritas baik untuk mendukung perbaikan inflasi maupun mendukung perbaikan neraca transaksi berjalan. Tiga komoditas lainnya, yaitu kelapa sawit, rumput laut, dan tebu menjadi prioritas jangka menengah-panjang dengan fokus pada perbaikan defisit transaksi berjalan serta mendukung ekonomi lebih inklusif.

Akselerasi hilirisasi pangan pada ketujuh komoditas tersebut perlu didukung upaya identifikasi terkait kondisi hilirisasi eksisting secara nasional dan spasial. Dari identifikasi tersebut, terlihat bahwa hilirisasi sudah berjalan pada sebagian komoditas meski dengan kapasitas yang masih relatif terbatas, sehingga kebutuhan impor masih cukup besar, seperti komoditas tebu. Di samping itu, terdapat komoditas yang cukup potensial untuk dilakukan

³ *Revealed Comparative Advantage* (RCA) digunakan untuk melihat keunggulan komparatif (daya saing) produk ekspor suatu negara dalam basket ekspor negara-negara di dunia, menggunakan formula:

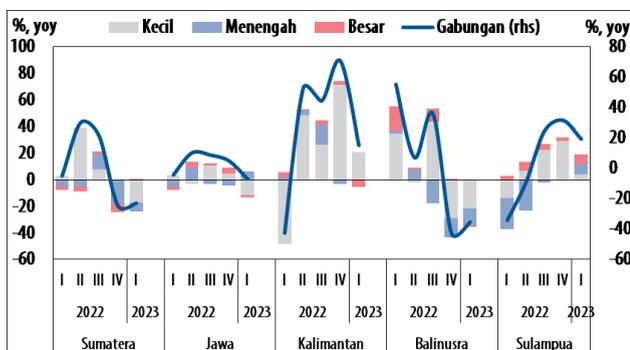
$$RCA_{it} = \frac{X_i / \sum_{i=1}^N X_i}{X_{iw} / \sum_{i=1}^N X_{iw}}, i = 1 \dots N; RCA_{it} \rightarrow RCA \text{ industri } i \text{ tahun } t; X_i \rightarrow \text{ ekspor produk } i \text{ dari negara tertentu}; X_{iw} \rightarrow \text{ ekspor produk } i \text{ dari seluruh dunia.}$$

RCA dikonversi menjadi angka simetrik *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA) menggunakan formula $RSCA = \frac{RCA_{it}-1}{RCA_{it}+1}$ untuk memudahkan visualisasi dan pengelompokan produk, dengan nilai pada kisaran $-1 \leq RSCA \leq 1$.

Trade Balance Index (TBI) menggambarkan *trade balance* dalam bentuk indeks di rentang $-1 \leq TBI \leq 1$ untuk memudahkan visualisasi dan pengelompokan produk, menggunakan formula:

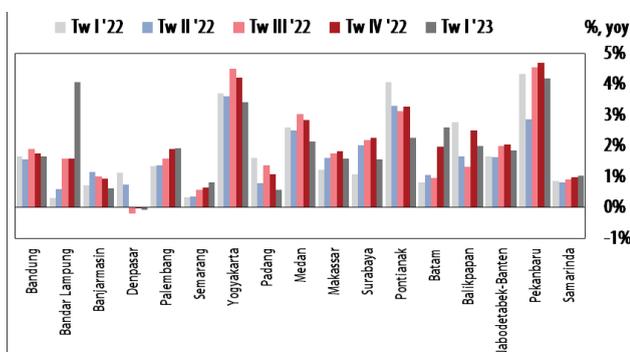
$$TBI_i = \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i}, i = 1 \dots N; X_i \rightarrow \text{ ekspor produk } i \text{ dari negara tertentu}; M_i \rightarrow \text{ impor produk } i \text{ dari negara tertentu}$$

mengindikasikan penjualan properti residensial di pasar primer masih tertahan. Hal ini tercermin dari penjualan yang melambat di seluruh wilayah, terutama untuk kategori rumah kecil dan besar (Grafik III.5). Di sisi lain, penjualan rumah menengah membaik di seluruh wilayah, terutama di Wilayah Jawa, sehingga menahan perlambatan lebih lanjut. Lebih lanjut, hasil survei juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan harga properti residensial di pasar primer masih tumbuh positif, meskipun melambat. Secara spasial, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) tercatat tumbuh positif meskipun melambat di mayoritas wilayah (Grafik III.6). Perlambatan tersebut sejalan dengan kinerja investasi bangunan yang diperkirakan masih tertahan pada triwulan I 2023. Hal ini juga dipengaruhi penurunan alokasi investasi untuk sektor properti di tengah *return* sektor properti yang berada di bawah suku bunga deposito.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik III.5. Penjualan Rumah Di Setiap Wilayah

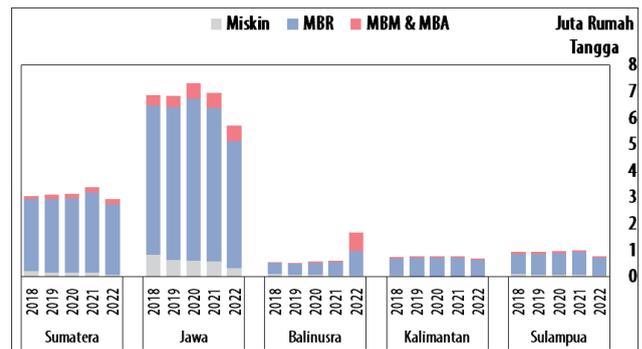


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik III.6. Pertumbuhan Harga Rumah Per Kota

Pangsa bangunan tempat tinggal cukup besar dalam investasi bangunan dan berpotensi mendorong kinerja LU Konstruksi sehingga perlu terus dioptimalkan. Di tengah permintaan yang melambat, potensi kebutuhan perumahan masih sangat tinggi, khususnya untuk kategori kecil, bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan data *Housing and Real Estate Information System* (HREIS) terkini, pada tahun 2022 *backlog*⁴ kepemilikan rumah mencapai 10,5 juta rumah tangga. Dari

jumlah tersebut, sekitar 9,07 juta rumah tangga atau sekitar 86% *backlog* kepemilikan berasal dari kelompok MBR. Secara spasial, *backlog* kepemilikan rumah untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini pun masih mendominasi di seluruh wilayah (Grafik III.7). Disamping itu, berdasarkan kategori usia, *backlog* perumahan juga didominasi oleh kategori usia 26-40 tahun (milenial) yang juga banyak bekerja di sektor formal (Sakernas 2022, BPS). Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pasar untuk produk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang menargetkan pekerja formal (*fixed income earners*) pun masih relatif besar.



Sumber: HREIS, KemenPUPR, diolah

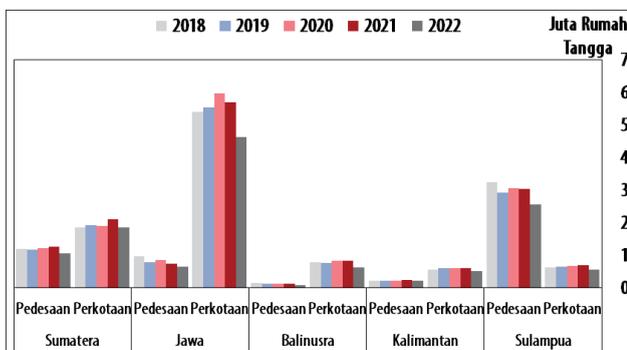
Grafik III.7. Backlog Rumah Berdasarkan Kelompok Pendapatan

Optimalisasi kinerja sektor properti sebagai daya ungkit perekonomian menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Dari sisi *supply*, tantangan terutama berhubungan dengan kepastian regulasi terkait dengan perencanaan tata ruang dan kepastian kebijakan terkait formulasi penetapan harga acuan rumah subsidi. Selain harga lahan yang tinggi, belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menyebabkan adanya ketidakpastian perencanaan tata ruang dan panjangnya proses perizinan pembangunan perumahan juga menjadi salah faktor yang menghambat minat investor dalam melakukan investasi di sektor properti. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) mencatat masih banyak provinsi di Indonesia yang belum memiliki RDTR. Hingga Desember 2022, jumlah RDTR baru mencapai 247 dari target program prioritas penyediaan RDTR yang ditetapkan sebanyak 2.000 RDTR Kabupaten/Kota selama tahun 2020-2024. Selain itu, belum adanya kepastian regulasi terkait formulasi penetapan harga acuan rumah subsidi juga terindikasi merupakan faktor yang menahan investasi di sektor properti lainnya, khususnya investasi dalam pembangunan perumahan subsidi yang diperuntukkan bagi MBR.

Relatif terbatasnya infrastruktur konektivitas yang menghubungkan pusat kota dengan suburban juga menjadi tantangan dalam menjembatani pemenuhan

⁴ Kondisi kesenjangan antara jumlah Rumah Tangga sudah dan belum memiliki rumah.

supply perumahan yang sesuai dengan preferensi mayoritas masyarakat Indonesia. Saat ini *backlog* kepemilikan perumahan di seluruh wilayah didominasi oleh daerah perkotaan (Grafik III.8). Namun demikian, berdasarkan hasil survei pada triwulan I 2023, mayoritas masyarakat Indonesia masih memilih rumah tapak dibandingkan dengan hunian vertikal (Rumah.com *Indonesia Consumer Sentiment Study*). Sehingga, ditengah harga lahan di perkotaan yang semakin tinggi, masih minimnya ketersediaan infrastruktur konektivitas berimplikasi pada kurangnya minat developer dalam menyediakan perumahan dengan harga lebih terjangkau di daerah suburban. Selain itu, hasil survei juga mengindikasikan bahwa minimnya ketersediaan infrastruktur konektivitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap hunian subsidi yang letaknya jauh dari pusat kota. Hal ini turut menghambat optimalisasi pemanfaatan *excess supply* rumah subsidi yang berada di luar kawasan perkotaan.



Sumber: HREIS, KemenPUPR, diolah

Grafik III.8. Backlog Perumahan Pedesaan dan Perkotaan

Sementara itu, dari sisi *demand*, tantangan terutama terkait dengan keterjangkauan harga dan biaya transaksi yang masih dinilai tinggi. Pada triwulan I 2023, masih cukup banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat subsidi namun tidak mampu membeli hunian subsidi (Survei Rumah.com). Hal ini mengindikasikan bahwa keterjangkauan harga masih merupakan kendala utama yang menahan permintaan masyarakat terhadap perumahan. Disamping itu, tingginya biaya transaksi jual/beli rumah, yang diantaranya meliputi biaya cek sertifikat, biaya Akta Jual Beli (AJB), biaya Balik Nama, Biaya Pajak Penghasilan (PPH), Biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lain sebagainya, juga terindikasi turut menahan permintaan perumahan, terutama pada segmen masyarakat dengan penghasilan terbatas.

Penguatan kinerja sektor properti sebagai daya ungkit perekonomian nasional memerlukan dukungan kebijakan. Mengingat masih tingginya *potential demand* perumahan terutama untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik dari sektor formal

maupun informal dan segmen milenial pekerja formal yang *bankable*, maka diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif dalam rangka mengoptimalkan potensi daya dukung sektor properti dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi *supply*, reformasi struktural melalui penguatan *hard* dan *soft infrastructure* perlu terus diperkuat. Pembangunan infrastruktur konektivitas penghubung antara pusat kota dan suburban perlu terus diakselerasi dalam rangka mendorong tersedianya rumah terjangkau yang sesuai dengan preferensi masyarakat dan mengoptimalkan pemanfaatan *excess supply* rumah subsidi luar kawasan perkotaan. Lebih lanjut, upaya percepatan penetapan RDTR untuk mendukung perbaikan iklim investasi di sektor properti perlu terus dilakukan.

Sinergi kebijakan pembiayaan dan insentif yang terintegrasi diperlukan untuk mendorong kinerja sektor properti. Kebijakan formulasi penetapan harga acuan unit subsidi yang transparan perlu didorong dalam rangka meningkatkan insentif developer dalam pembangunan rumah subsidi yang mendominasi *backlog* kepemilikan rumah saat ini. Sementara dari sisi *demand*, kebijakan perlu diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga dan perluasan jangkauan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh seluruh segmen lapisan masyarakat, terutama MBR, masyarakat yang bekerja di sektor informal dan milenial pekerja formal yang *bankable*.

Kebutuhan Pembiayaan Hilirisasi Pangan & Sektor Perumahan untuk Mendorong Perekonomian

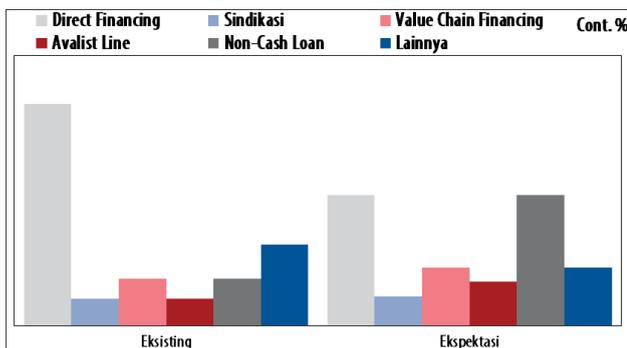
Perekonomian nasional yang bertumpu pada kinerja LU di seluruh wilayah membutuhkan dukungan strategi pembiayaan yang memadai. Hal ini terutama diperlukan dalam menjaga akselerasi daya ungkit perekonomian yang berfokus pada kemandirian penyediaan kebutuhan dasar diantaranya pangan dan tempat tinggal. Dalam memenuhi potensi kebutuhan tersebut, kebijakan pembiayaan hilirisasi pangan dan sektor perumahan diarahkan untuk memperkuat resiliensi, sinergi, dan mencapai produktivitas serta efisiensi yang tinggi dalam perekonomian nasional. Namun demikian, implementasi strategi pembiayaan masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang perlu diselesaikan secara bertahap melalui berbagai kebijakan yang optimal diiringi dengan koordinasi dan regulasi yang kuat bersama K/L.

Strategi Kebijakan untuk Pembiayaan Hilirisasi Pangan

Perkembangan Pembiayaan Hilirisasi Pangan Korporasi pangan skala kecil masih membutuhkan dorongan dan dukungan lebih tinggi mengingat

segmentasi yang masih terpusat pada industri hulu dengan level teknologi yang relatif lebih tradisional (*low technology*). Berbagai kendala korporasi kecil dalam melakukan hilirisasi sebagian besar disebabkan oleh minimnya ketersediaan kapasitas pengolahan, kebutuhan modal yang cukup besar, serta pasar untuk produk turunan hasil dari proses lanjutan yang belum sepenuhnya terbuka. Di sisi lain, korporasi kecil cenderung memanfaatkan dana internal untuk membiayai kebutuhan ekspansi termasuk hilirisasi.

Saat ini pembiayaan eksternal korporasi kecil masih didominasi oleh skema *direct financing*. Selain itu, pembiayaan eksternal juga terutama diperoleh dari *noncash loan* dan *value chain financing* (Grafik III.9). Skema pembiayaan ini diperoleh secara langsung dari perbankan dalam bentuk penyaluran kredit (misalnya dalam bentuk Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja) sehingga target dari pembiayaan ini cenderung hanya menasar secara spesifik pada lini bisnis korporasi pangan tertentu atau belum optimal menyentuh rantai industri pangan secara menyeluruh. Model pembiayaan korporasi secara *direct financing* juga ditemukan mendominasi korporasi di seluruh wilayah yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Balinusra, dan Sulampua.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik III.9. Skema Pembiayaan Hilirisasi Korporasi Kecil

Ke depan, potensi untuk meningkatkan pembiayaan eksternal melalui berbagai skema pembiayaan sangat terbuka sejalan dengan ekspektasi korporasi terhadap jenis pembiayaan eksternal yang lebih variatif. Korporasi kecil di beberapa wilayah memiliki *demand* kebutuhan skema pembiayaan yang lebih menasar rantai industri secara menyeluruh seperti *avalist line*, *sindikasi*, *non-cash loan*, dan *value chain financing*. Kebutuhan ini selain didorong oleh model bisnis yang lebih terintegrasi serta kebutuhan penjualan korporasi pangan seperti untuk ekspor. Sebagai contoh, korporasi di Kalimantan memiliki kebutuhan skema *sindikasi*. Hal ini dikarenakan nilai proyek hilirisasi produk perkebunan (seperti beras dan CPO) relatif besar dan diharapkan pembiayaan tersebut dapat melibatkan lebih dari satu bank untuk *sharing* risiko. Contoh lainnya, korporasi di Balinusra dan Sulampua memiliki

kebutuhan skema pembiayaan *value chain financing* agar pemanfaatan lebih fleksibel dan memberikan kepastian pembiayaan *buyer* dan *supplier*. Di sisi lain, korporasi besar telah menunjukkan tingkat hilirisasi lebih baik didukung dengan skema pembiayaan yang relatif lebih merata, ketersediaan industri hilir yang memadai serta level teknologi korporasi berada di rentang *medium to high technology* sehingga berpengaruh positif pada nilai tambah produk, SDM, dan ketenagakerjaan.

Faktor Modalitas Pembiayaan Hilirisasi Pangan

Dari sisi modalitas pembiayaan, korporasi kecil masih membutuhkan dukungan untuk melakukan hilirisasi.

Aspek pembiayaan menjadi salah satu kendala utama di samping kebutuhan penguatan aspek teknologi dan SDM agar korporasi kecil dapat meningkatkan aktivitas hilirisasi. Secara lebih detail, modalitas pembiayaan yang masih perlu diperkuat dalam konteks hilirisasi di antaranya adalah permasalahan agunan, suku bunga kredit yang belum kompetitif, dan kebutuhan permodalan yang relatif besar. Karakteristik bisnis korporasi pangan yang bergantung pada produksi musiman serta valuasi usaha pangan yang cenderung belum terstandar dengan baik, menyebabkan sulitnya penentuan agunan dan penawaran suku bunga kredit yang paling sesuai. Secara umum di seluruh wilayah khususnya yang memiliki rantai produksi dan komoditas hulu – hilir yang sederhana cenderung terfokus pada skema pembiayaan dalam bentuk *direct financing*. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya penentuan agunan karena tidak terdapat estimasi penjualan atau kepastian *buyer* dan *supplier* yang dipertimbangkan dalam skema pembiayaan.

Secara spasial, kendala modalitas pembiayaan korporasi kecil di beberapa wilayah memiliki perbedaan dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah. Di wilayah Sumatera, kebutuhan korporasi pangan mayoritas adalah pemodalannya tambahan untuk ekspansi hilirisasi lanjutan dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha hulu perkebunan non-formal. Di wilayah Jawa, kebutuhan pemodalannya besar untuk ekspansi bisnis pertanian dan pembiayaan ekspor produk pangan berisiko terjadi *mismatch* sehingga membutuhkan jaminan. Sementara di wilayah Kalimantan, nilai proyek hilirisasi yang relatif besar pada beberapa proyek komoditas pangan perlu melibatkan sinergi pembiayaan dan investasi yang signifikan. Di wilayah Balinusra, kebutuhan pembiayaan ditujukan untuk menguatkan aspek teknologi dan SDM dalam ekspansi produksi. Terakhir di wilayah Sulampua, akses pembiayaan belum optimal seiring banyaknya usaha informal dan persyaratan agunan tidak *match* dengan valuasi usaha korporasi terkait hilirisasi.

Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pembiayaan Hilirisasi Pangan

Dalam menjawab tantangan dan mendukung kebutuhan perluasan variasi skema pembiayaan hilirisasi pangan, diperlukan penguatan kebijakan dan mekanisme pembiayaan hilirisasi pangan. Sinergi dan Koordinasi kebijakan juga dibutuhkan dalam melakukan penguatan bisnis model pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan hilirisasi pangan, termasuk pengembangan kredit pertanian yang sesuai dengan karakteristik jangka waktu tanaman semusim.

Pembiayaan korporasi pangan yang lebih terencana baik dari sisi penyaluran maupun fleksibilitas angsuran perlu mendapatkan perhatian lebih. Melalui penyempurnaan dan perluasan manfaat mekanisme *grace period*, produktivitas sektor pertanian dapat ditingkatkan dengan mengurangi risiko kegagalan bayar secara bersamaan. Dalam hal ini, untuk tanaman keras yang bersifat jangka panjang seperti CPO dimungkinkan untuk mendapatkan *grace period*. Sementara itu untuk tanaman semusim, salah satu alternatif solusinya adalah pengembangan produk kredit yang tenornya disesuaikan dengan musim tanam dan siklus panen. Produk sejenis sudah ada dalam KUR Sektor Pertanian dan ke depan dipandang perlu untuk diperluas tidak hanya melalui KUR. Mekanisme kredit *existing* baik seperti dalam bentuk Kredit Modal Kerja dan Investasi dapat diperluas dengan mengakomodasi fleksibilitas tenor berdasarkan sektor tertentu yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan upaya pengelolaan produk turunannya melalui program hilirisasi.

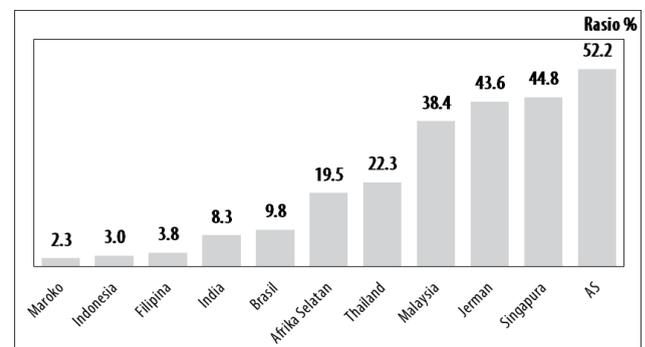
Guna mendorong pembiayaan hilirisasi khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas produksi diperlukan dukungan kebijakan pembiayaan melalui koordinasi lintas kebijakan dan koordinasi fiskal. Mekanisme kerjasama dalam fasilitasi pembiayaan Lembaga Keuangan (*business matching*) dapat mendukung penyaluran modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Inovasi produk kredit dengan periode yang disesuaikan siklus panen di masing-masing komoditas juga dapat diterapkan ke depannya. Dari sisi pengelolaan risiko pembiayaan, kerja sama antara akademisi, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga penjamin dapat membantu penyaluran pembiayaan dengan risiko kegagalan yang minim. Akademisi berperan dalam menjaga *best practice* produksi dan kinerja korporasi pangan, pemerintah daerah dapat berperan sebagai pendamping dan pengawas melalui dinas maupun BUMD, serta lembaga penjamin berperan penting dalam mengantisipasi terjadinya risiko produksi karena *force majeure*. Oleh karena itu, dari sisi otoritas, kebijakan BI

dan fiskal dapat memfasilitasi kebutuhan pembiayaan korporasi pangan melalui inovasi dan sinergi lintas K/L.

Strategi Kebijakan untuk Pembiayaan Sektor Perumahan

Perkembangan Pembiayaan Sektor Perumahan

Kinerja perumahan di Indonesia saat ini berpotensi besar untuk lebih dikembangkan seiring dengan pemenuhan permintaan properti yang masih rendah. Beberapa wilayah dengan *backlog* kepemilikan rumah dan jumlah pekerja formal tinggi merupakan potensi pasar yang besar dalam mendorong KPR. Wilayah dengan *backlog* kepemilikan rumah yang tinggi menunjukkan salah satunya adalah *supply* KPR terbatas di tengah *demand* yang tinggi. Kondisi ini merupakan peluang bagi *developer* dalam meningkatkan *supply* properti sesuai dengan karakteristik permintaan di setiap daerah. Selain itu, wilayah dengan jumlah pekerja formal tinggi juga menjadi pasar yang prospektif untuk mendorong KPR. Hal ini disebabkan pekerja formal yang lebih mudah disetujui menjadi debitur KPR dan berpotensi memiliki *repayment capacity* yang baik. Secara spasial, daerah dengan pekerja formal dan *backlog* yang tinggi serta KPR relatif terbatas adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi D.I. Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi D.I. Yogyakarta.



Sumber: BTN, diolah

Grafik III.10. Perbandingan Rasio KPR Terhadap PDB 2020

Di samping itu, kontribusi KPR terhadap PDB saat ini masih relatif terbatas sehingga mendorong kebutuhan penguatan dan koordinasi kebijakan secara menyeluruh. Di tengah permintaan aplikasi KPR yang meningkat pada triwulan II 2023 yang mencapai 7,3% (yoy), rasio KPR terhadap PDB Indonesia pada tahun 2020 hanya sebesar 3,0% (Grafik III.10). Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya masih cukup rendah atau bahkan negara Eropa sangat jauh tertinggal. Perkembangan KPR secara spasial cenderung terjaga dengan wilayah Jawa memiliki pangsa terbesar (78%) terhadap KPR nasional dan merupakan sumber pertumbuhan KPR pada triwulan II 2023. Adapun jenis properti KPR merupakan rumah tapak tipe >21

- 70 yang mendominasi penyaluran di seluruh wilayah. Dari sisi risiko kredit, NPL seluruh wilayah masih relatif terjaga dengan risiko terbesar merupakan pembiayaan KPR tipe rusun di Kalimantan dengan NPL yang mendekati 4%. Sementara di wilayah lainnya besaran NPL KPR berada dalam rentang yang relatif aman yaitu di kisaran 0% - 3%.

Penguatan Model Pembiayaan dan Koordinasi Kebijakan Sektor Perumahan

Penyempurnaan model bisnis pembiayaan sektor perumahan yang mempertimbangkan kemampuan beli masyarakat dengan tepat dapat meningkatkan pertumbuhan KPR. Perbedaan penyesuaian model bisnis ini perlu memerhatikan potensi pengeluaran untuk rumah bagi masyarakat pada berbagai rentang pendapatan. Segmen MBR dan masyarakat dengan rentang pendapatan rendah memiliki kemampuan pengeluaran untuk perumahan yang relatif terbatas sehingga paling membutuhkan subsidi KPR dengan berbagai skema. Melalui subsidi dan penyesuaian model pembiayaan, peluang masyarakat segmen ini untuk mendapatkan perumahan menjadi lebih tinggi.

Rangkaian kebijakan yang dilakukan pada sektor perumahan seperti penyesuaian model bisnis pembiayaan juga berpotensi akan meningkatkan akses masyarakat pada perbankan. Peningkatan akses pada perbankan ini pada gilirannya akan meningkatkan

permintaan kredit dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, skema *rent to own* akan membuka akses sektor informal pada KPR karena skema awal yang ringan melalui perpaduan antara mekanisme sewa dan beli. Perbankan sebagai penyalur kredit juga lebih aman dalam melakukan pembiayaan KPR setelah mengetahui profil nasabah dari perilakunya saat melakukan sewa. Selain itu, diperlukan penguatan fitur KPR dengan fokus MBR dan masyarakat pendapatan rendah baik dari sisi masa tenor subsidi yang lebih fleksibel serta uang muka yang terjangkau. Kepastian tingkat suku bunga dan biaya beban bunga yang terjangkau juga dibutuhkan MBR dan masyarakat pendapatan menengah dalam memperoleh hunian sesuai dengan kemampuan pengeluaran untuk perumahan. Mekanisme subsidi yang saat ini telah berjalan dengan baik seperti FLPP, SSB, dan SBUM dapat diintegrasikan dengan KPR yang telah diperkuat fitur dan mekanismenya sehingga kolaborasi antar kebijakan dan kelembagaan memiliki peran yang penting. Kolaborasi penyesuaian model bisnis tersebut juga dilengkapi dengan kebijakan sisi *demand* lainnya seperti sinergi makroprudensial-fiskal seperti KPR sebagai bagian dari faktor pengurang pajak penghasilan dan penguatan kelembagaan seperti percepatan pembentukan Bank Tanah. Secara spesifik penguatan kebijakan makroprudensial di sisi *supply* didukung koordinasi K/L seperti OJK, Kemenkeu, KemenPUPR, Pemda, Asosiasi Properti, dan Developer akan meningkatkan *demand* perumahan yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Model Bisnis, Tahapan dan *Lesson Learned* Hilirisasi Pangan

Model Bisnis Generik Hilirisasi Pangan *Overview Model Bisnis Generik Hilirisasi Pangan*

Idealnya, permintaan pasar (*market demand*) atas produk pangan olahan, baik di dalam maupun luar negeri, menjadi pemicu proses hilirisasi pangan. Selanjutnya, untuk memenuhi permintaan pasar diperlukan kerja sama dengan industri pengolahan/UMKM *agregator* dalam bentuk kontrak kerja sama. Dalam prosesnya, untuk memastikan kualitas produk, masing-masing pihak dapat melaksanakan sertifikasi sesuai dengan standar tertentu, termasuk Jaminan Produk Halal (JPH) untuk pasar syariah.

Di samping jaminan pasar, stabilitas pasokan dan kualitas bahan baku merupakan kunci penting untuk memastikan keberlanjutan produksi olahan pangan. Untuk itu, industri pengolahan/UMKM *agregator* akan mencari kluster *champion* (termasuk unit usaha pesantren/komunitas pada skema syariah) yang dapat memasok bahan baku secara tepat waktu, baik kuantitas maupun kualitas. Kerja sama antara industri pengolahan/UMKM *agregator* dapat dituangkan dalam bentuk *contract farming*.

Kluster *champion* yang beranggotakan para petani dan nelayan akan memfasilitasi perolehan bahan baku sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kluster akan mengumpulkan hasil panen dari petani atau nelayan, untuk melakukan sortasi dan memastikan kualitas dan kuantitas bahan baku yang akan dikirim ke UMKM *agregator*/industri pengolahan. Kemudian, UMKM *agregator*/industri pengolahan akan mengolah bahan baku menjadi produk turunan olahan berkualitas sesuai permintaan pasar.

Pembiayaan dalam Model Bisnis Generik Hilirisasi Pangan

Terdapat berbagai skema pembiayaan dari hulu ke hilir yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pelaku usaha yang terlibat dalam rantai nilai hilirisasi pangan. Di sisi hilir, terdapat skema *Account Payable (A/P) Financing* dan skema *Purchase Order Financing*. Di sisi pengolahan, terdapat skema *Invoice Financing* yang dapat digunakan oleh industri pengolahan/UMKM *agregator* selaku *supplier* dengan *underlying invoice* kepada pembeli, serta Pembiayaan Inti Plasma. Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu alternatif skema pembiayaan di sisi hulu. Adapun pembiayaan hilirisasi kluster pangan juga

dapat diperoleh dari *corporate social responsibility* (CSR)/Dana Filantropi/Dana Sosial Syariah yang merupakan dana hibah.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar III.3. Model Bisnis Generik Hilirisasi Kluster Pangan

Alur Hilirisasi Kluster Pangan

Mengacu pada model bisnis generik hilirisasi kluster pangan, alur hilirisasi kluster pangan dimulai dari identifikasi *potential demand* untuk produk olahan pangan. Identifikasi pasar potensial dapat dilakukan secara mandiri oleh industri pengolahan/UMKM *agregator* atau *market intelligence* yang dapat difasilitasi oleh kementerian/lembaga/pihak lainnya. Hasilnya dielaborasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi secara spesifik jenis produk olahan pangan yang diminati target pasar dan kebutuhan produksinya.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar III.4. Alur Hilirisasi Kluster Pangan

Dalam melakukan pengolahan produk turunan, diperlukan *local leader* yang dapat menggerakkan kluster potensial untuk menjadi kluster *champion*. Hal ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku secara tepat waktu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Apabila kluster melakukan pengolahan dan pemasaran secara mandiri, maka perlu dibentuk kelembagaan formal.

Best Practice Model Bisnis per Komoditas

Beras

Salah satu *best practice* model bisnis hilirisasi komoditas beras adalah salah satu kluster binaan Bank Indonesia.

Melalui pembentukan BUMP, pemanfaatan *Rice Milling Unit* (RMU), dan keberadaan klaster *champion*, klaster mampu menghasilkan aneka produk turunan hingga mampu menembus pasar ekspor. Keunggulan mereka antara lain pemenuhan sertifikasi organik internasional, pemanfaatan sistem resi gudang, dan adanya *champion* petani milenial.

Cabai

Praktik hilirisasi lainnya dilakukan klaster cabai binaan Bank Indonesia Sumatera Utara yang telah mampu mengolah cabai menjadi produk turunan seperti saos dan cabai bubuk. Keunggulan klaster diantaranya ialah melakukan pengembangan varietas lokal unggul dan pemanfaatan *digital farming* untuk menjaga kontinuitas *supply*, optimalisasi *learning center* cabai, dan pemanfaatan sub terminal agribisnis.

Bawang Merah

Hilirisasi bawang merah juga diterapkan pada klaster binaan Bank Indonesia Tegal melalui pembentukan BUMP dan sinergi berbagai *stakeholders*. BUMP berperan sebagai UMKM agregator yang melakukan pengolahan produk bernilai tambah. Pengembangan BUMP tersebut bersinergi dengan berbagai *stakeholders* baik dari kementerian/lembaga, dinas setempat, maupun instansi lainnya.

Perikanan untuk Pengendalian Inflasi

Pada komoditas perikanan, salah satu *best practice* model bisnis untuk pengendalian inflasi yaitu dengan membangun rumah produksi atau tempat pengolahan bersama (*factory sharing*) yang dapat digunakan oleh para UMKM. *Factory sharing* ini dapat mempermudah akses bagi UMKM untuk menggunakan sarana prasarana pengolahan yang berkualitas dan tersertifikasi.

Perikanan untuk Potensi Ekspor

Model bisnis hilirisasi komoditas perikanan lainnya yang bertujuan ekspor diterapkan dengan membentuk *mini plant*

sebagai tempat pengolahan produk perikanan menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang dimiliki oleh industri pengolahan/UMKM agregator. Selanjutnya, *digital traceability* digunakan untuk melacak pergerakan komoditas perikanan, untuk memudahkan pengelolaan dan pelacakan siklus hidup termasuk memastikan kualitas komoditas perikanan yang dihasilkan.

Prasyarat, Tahapan dan Key Success Factor Hilirisasi Klaster Pangan

Tidak seluruh klaster pangan dapat melakukan hilirisasi.

Untuk melakukan hilirisasi klaster pangan setidaknya diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain memiliki kelembagaan atau korporatisasi petani yang kuat, terdapat potensi kemitraan, memiliki akses terhadap sarana dan prasarana pengolahan, serta kontinuitas pasokan yang berkualitas dan terdapat potensi pasar.

Terdapat beberapa tahapan hilirisasi klaster pangan yang dipetakan baik berdasarkan prasyarat maupun faktor lainnya.

Terdapat 4 (empat) tahapan dalam hilirisasi klaster pangan, yaitu 1) pre-hilirisasi, yaitu klaster yang belum melakukan hilirisasi dan belum memenuhi seluruh prasyarat hilirisasi, 2) inisiasi, yaitu klaster yang sudah memenuhi sebagian besar prasyarat hilirisasi, namun belum melakukan hilirisasi, 3) akselerasi, yaitu tahapan dimana klaster telah melakukan hilirisasi namun dengan skala yang masih terbatas, dan 4) ekspansi, dimana klaster sudah melakukan hilirisasi dengan skala yang cukup namun masih memerlukan perluasan agar berkelanjutan.

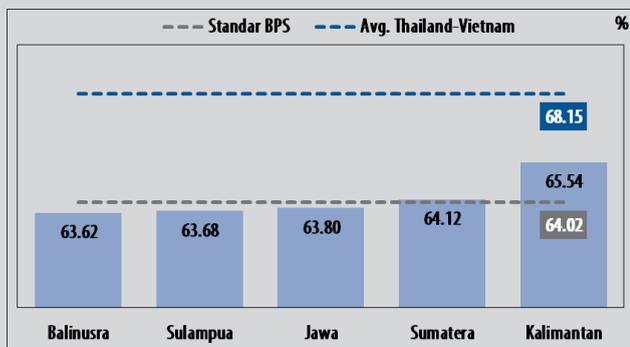
Berdasarkan model bisnis, prasyarat, dan tahapan hilirisasi pangan dapat disimpulkan setidaknya terdapat lima *key success factor* hilirisasi klaster pangan. Kelima *key success factor* tersebut ialah klaster harus menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar, terintegrasi dari hulu ke hilir, memiliki pasar yang berkelanjutan, didukung sinergi *stakeholders* dan kemitraan yang kuat, serta memiliki skema pembiayaan yang mendukung.

Operasionalisasi Strategi Hilirisasi Pangan

Dalam kerangka pengembangan UMKM dan kluster, Bank Indonesia mendorong implementasi program hilirisasi komoditas pangan dengan fokus pada beras, bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, serta komoditas perikanan tangkap yang umumnya berkontribusi pada inflasi. Melalui peningkatan hilirisasi pangan, diharapkan lebih banyak produk pertanian yang diolah dan tersedia dalam bentuk siap konsumsi sehingga dapat menjaga ketersediaan pasokan pangan tetap stabil bahkan ketika ada fluktuasi dalam produksi.

Beras

Hilirisasi komoditas beras diprioritaskan pada perbaikan rendemen dan mutu beras sehingga dapat menghasilkan beras premium yang memiliki nilai tambah tinggi. Strategi perbaikan rendemen dan mutu beras menjadi prioritas karena rendemen dan mutu beras di Indonesia masih di bawah standar BPS dan rata-rata negara produsen lainnya (Grafik III.11). Dengan perbaikan rendemen dan mutu beras, diharapkan akan terjadi peningkatan hasil panen dan kualitas pangan. Kualitas beras yang lebih baik akan menciptakan beras premium yang memiliki nilai tambah lebih tinggi bagi perekonomian.

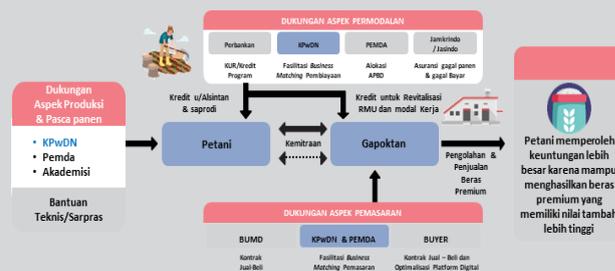


Sumber: BPS

Grafik III.11. Rata-Rata Tingkat Rendemen Beras Berdasarkan Wilayah

Untuk mengupayakan perbaikan rendemen dan mutu beras, Bank Indonesia akan berfokus pada tiga strategi utama (*quicks wins*) yaitu penguatan kelembagaan, *upgrading* pengolahan, dan pembiayaan (Gambar III.5). Pertama, penguatan lembaga kluster beras binaan dalam rangka memastikan kontinuitas gabah. Kelembagaan kelompok tani merupakan faktor penting untuk mendukung keberhasilan hilirisasi karena kelembagaan membantu efisiensi produksi dengan cara mengkoordinasi petani dalam penggunaan sumber daya dan teknologi yang lebih

baik. Selain itu, kelembagaan kluster juga memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi terkini kepada petani, sehingga dapat mengadopsi praktik pertanian yang lebih modern dan efisien. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas gabah, sehingga rendemen dan mutu beras dapat ditingkatkan.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar III.5. Model Operasionalisasi Strategi Quick Wins Hilirisasi Komoditas Beras

Kedua, Bank Indonesia akan mendukung upaya *upgrading* kualitas alat mesin pertanian (*alsintan*) pascapanen dan *Rice Milling Unit (RMU)* skala kecil milik kluster pangan binaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam proses pascapanen dan pengolahan beras. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan *capacity building* bagi kelompok tani agar pemanfaatan *alsintan* dan pengelolaan RMU dilakukan lebih optimal. Dengan adanya peningkatan kualitas *alsintan* dan pemanfaatannya yang baik, diharapkan produktivitas dan kualitas beras dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi petani dan mendorong keberhasilan hilirisasi beras.

Ketiga, Bank Indonesia memperkuat fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan untuk mendukung peningkatan kualitas *alsintan* pascapanen, *upgrading RMU*, serta modal kerja. Dengan tersedianya akses pembiayaan yang memadai, petani akan memiliki alat pertanian modern dan memperbarui teknologi pada RMU. Selain itu, pembiayaan juga akan mendorong kelancaran produksi beras, meningkatkan efisiensi, dan produktivitas usaha.

Cabai Merah

Di tengah pasokan cabai yang fluktuatif karena tantangan disparitas ketersediaan cabai antarwaktu dan antardaerah, strategi hilirisasi menjadi solusi untuk memperpanjang masa simpan, menjaga stabilitas harga dan meningkatkan nilai tambah produk. Strategi hilirisasi

diprioritaskan pada pengolahan produk turunan cabai seperti bubuk cabai, saus cabai, atau cabai kering, yang memiliki masa simpan yang lebih panjang, sehingga dapat mengurangi volatilitas harga berbagai komoditas tersebut.

Dalam mengoperasionalkan program hilirisasi komoditas cabai, Bank Indonesia berfokus pada tiga strategi utama yaitu identifikasi permintaan, inovasi, dan pembiayaan (Gambar III.6). Pertama, penguatan identifikasi, pengembangan produk dan kemitraan berbasis *market demand* pada kluster cabai binaan. Selain itu, kemitraan dengan pelaku bisnis juga menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan pemasaran produk turunan cabai. **Kedua,** mengoptimalkan inovasi melalui dukungan sarpras dan pemanfaatan teknologi. Dukungan sarpras dan inovasi pengolahan produk turunan cabai dapat mendorong efisiensi dan kualitas produk. **Ketiga,** memperkuat fasilitasi akses pembiayaan modal kerja dan investasi. Penguatan akses pembiayaan akan membantu kluster cabai dalam meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi, dan mengatasi tantangan volatilitas harga.



Sumber: Bank Indonesia
Gambar III.6. Model Operasionalisasi Strategi Quick Wins Hilirisasi Komoditas Cabai

Bawang Merah

Hilirisasi bawang merah ditujukan untuk menciptakan nilai tambah produk, mengurangi fluktuasi harga saat panen raya, dan diversifikasi produk. Komoditas bawang merah yang memiliki sifat alami tidak dapat ditanam di mana saja, sehingga menyebabkan defisit bawang merah di beberapa wilayah dan harga serta pasokannya berfluktuasi sesuai periode panen (Grafik III.7).

Operasionalisasi strategi hilirisasi bawang merah kluster binaan juga berfokus pada tiga poin utama yaitu identifikasi permintaan, inovasi, dan pembiayaan. Pertama, mengidentifikasi dan mengembangkan produk bawang merah berdasarkan permintaan pasar (*market demand*) untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai

dengan kebutuhan konsumen. **Kedua,** mengoptimalkan inovasi dalam pengolahan bawang merah melalui dukungan sarana prasarana serta memanfaatkan teknologi hilirisasi bawang merah. *Learning center* akan digunakan sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan inovasi di bidang pengolahan produk turunan bawang merah. **Ketiga,** memperkuat fasilitasi akses pembiayaan modal kerja dan investasi.



Sumber: Bank Indonesia
Gambar III.7. Model Operasionalisasi Strategi Quick Wins Hilirisasi Komoditas Bawang Merah

Perikanan

Operasionalisasi strategi hilirisasi difokuskan pada tiga poin utama, yaitu penguatan linkage kelembagaan, kapasitas, dan pembiayaan (Gambar III.8). Pertama, penguatan *linkage* kelembagaan bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga terkait. **Kedua,** penguatan kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan pelaku usaha perikanan. **Ketiga,** pentingnya fasilitasi pembiayaan bagi kluster perikanan. Pembiayaan menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran operasional dan ekspansi kluster perikanan. Untuk itu, Bank Indonesia berperan dalam mendukung fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan, sehingga para pelaku usaha perikanan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, serta berkontribusi positif terhadap perekonomian.



Sumber: Bank Indonesia
Gambar III.8. Model Operasionalisasi Strategi Quick Wins Hilirisasi Komoditas Perikanan

Inovasi Hilirisasi Tanaman Kelapa Sawit Berbasis Koperasi: Pabrik Minyak Makan Merah (3M)

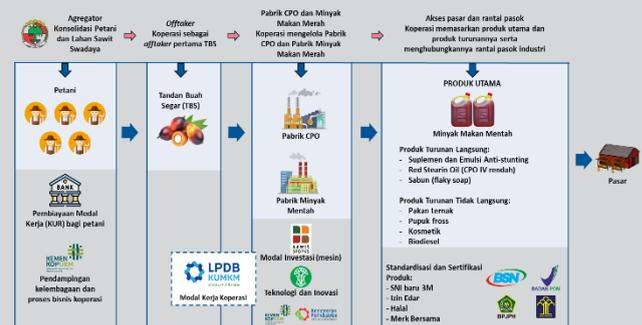
Salah satu bentuk inovasi hilirisasi pangan, khususnya dalam skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang perlu dikembangkan di Wilayah Sumatera adalah hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi melalui pembangunan dan pengembangan Pabrik Minyak Makan Merah (3M). Produk 3M ini merupakan produk olahan *crude palm oil* (CPO) melalui proses penyulingan/pemurnian tanpa dilanjutkan dengan proses apapun. Proses produksi 3M mencakup: (1) pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi CPO melalui proses *oil pressing*; (2) pengolahan CPO menjadi 3M melalui proses *degumming*, netralisasi, dan deodorisasi, dan (3) pengolahan 3M melalui proses fraksinasi menjadi *High Oleic Low Palmitic* (HLPD) dan *Red Palm Stearin*. 3M memiliki warna terang mencolok dan aroma yang kuat.

Pengembangan 3M di Wilayah Sumatera penting dilakukan karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain: (1) kandungan gizi 3M mencakup Vitamin A, Vitamin B, dan senyawa organik Skualena yang lebih tinggi dari minyak goreng kelapa sawit biasa sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan pendukung *anti-stunting*; (2) pengembangan 3M yang hanya boleh dilakukan oleh koperasi produsen petani akan memberikan nilai tambah serta dapat meningkatkan posisi tawar petani pada mata rantai pasok kelapa sawit; dan (3) menjadi alternatif minyak goreng yang lebih sehat dan ekonomis karena harga 3M yang lebih terjangkau diperkirakan sekitar Rp 9.000/liter.

Pengembangan 3M telah terlebih dahulu dilakukan oleh Malaysia yang merupakan eksportir terbesar dunia untuk produk minyak olein merah atau minyak makan merah. Adapun negara tujuan ekspor mencakup Cina, Jepang, India, Taiwan, dan Angola. Malaysia juga telah mengekspor 1.187 ton minyak merah ke Cina pada tahun 2020 untuk mengatasi defisiensi Vitamin A di berbagai provinsi di Cina.

Selain keunggulan kandungan produknya, dari sisi investasi, pengembangan industri 3M dinilai cukup menguntungkan. Nilai investasinya ialah sebesar Rp15 Miliar dan B/C Ratio lebih dari 1 serta *internal rate of return* (IRR) sebesar 18,17% dan *payback period* selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Pemerintah telah menginisiasi pengembangan industri 3M melalui *pilot project* pembangunan Pabrik 3M di Sumatera Utara.

Dalam pengembangannya, model bisnis 3M ini melibatkan berbagai *stakeholders*, baik Koperasi, Kementerian/Lembaga, hingga perusahaan mitra. Pada saat ini, terdapat 3 (tiga) pabrik 3M yang sedang dibangun di Sumatera Utara, yakni di Kab. Deli Serdang (pengelola: Koperasi Pujakesuma), Kabupaten Langkat (pengelola: Koperasi Sawit Unggul Sejahtera), dan Kabupaten Asahan (pengelola: Koperasi Produsen Petani Indonesia). Adapun Pabrik 3M Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang yang dibangun di areal pabrik kelapa sawit milik PTPN II Pagar Merbau ditargetkan mulai beroperasi tahun 2023 dengan kapasitas produksi sebesar 7,4 ton/hari. Pengembangan ketiga pabrik 3M tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 8.100 ton Minyak Makan Merah/tahun atau dapat memenuhi sebesar 1,2% dari total konsumsi minyak goreng di Sumatera Utara.



Sumber: KemenkopUKM

Gambar III.9. Skema Bisnis Pabrik Minyak Makan Merah

Adapun inovasi skema model bisnis Pabrik 3M berbasis koperasi yang dapat dikembangkan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

Koperasi sebagai Agregator Konsolidasi Petani dan Lahan Sawit Swadaya

Pada tahap awal ini, Koperasi memiliki peran strategis sebagai koordinator para petani dalam proses produksi dan menjadi fasilitator terkait dengan pengelolaan lahan sawit swadaya. Melalui peran ini, Koperasi diharapkan dapat membantu proses standarisasi manajemen produksi agar produktivitas dan kualitas hasil produksi dapat terjaga secara optimal. Pada tahap ini dibutuhkan peran Perbankan untuk dapat membantu

menyalurkan pembiayaan modal kerja (produk KUR/komersial) kepada petani. Dalam hal ini, Koperasi dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses *business matching* antara pihak Perbankan dengan petani calon penerima pembiayaan.

Pada tahap ini juga dibutuhkan peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI.

Peran Kemenkop UKM ialah untuk dapat membantu proses pendampingan kelembagaan Koperasi termasuk penyusunan *standard operating procedures* (SOP) proses bisnis Koperasi agar dapat optimal menjalankan peran dalam skema bisnis Pabrik 3M berbasis koperasi ini. Di sisi hulu, Bank Indonesia melalui Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dapat berperan untuk memberikan pendampingan produksi kepada para petani sawit anggota Koperasi.

Koperasi sebagai *Offtaker* Pertama Tandan Buah Segar (TBS)

Pada tahap kedua ini, Koperasi berperan sebagai *offtaker* dengan membeli hasil panen produk TBS dari para petani yang menjadi anggota Koperasi. Dalam rangka mendukung peran tersebut, Koperasi membutuhkan ketersediaan likuiditas yang baik. Oleh karena itu, pada tahap ini dibutuhkan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk dapat membantu menyalurkan pinjaman/pembiayaan sebagai modal kerja bagi pengembangan usaha Koperasi, termasuk dalam mendukung perannya sebagai *offtaker* tersebut.

Koperasi sebagai Pengelola Pabrik CPO dan 3M

Pada tahap ketiga ini, Koperasi memiliki peran strategis sebagai pengelola Pabrik CPO dan 3M dengan bahan baku TBS yang diperoleh dari para petani di tahap kedua. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam proses hilirisasi kelapa sawit agar mampu menghasilkan produk utama dan turunan 3M yang berkualitas dan berdaya saing tinggi baik untuk pasar ekspor maupun domestik.

Pada tahap ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan modal investasi. Bantuan tersebut antara lain berupa mesin produksi beserta sarana dan

prasarana produksi lainnya sehingga mendukung terwujudnya proses produksi yang efektif, efisien, dan optimal. Selain itu, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) juga dapat turut terlibat dalam tahap ini untuk penetrasi teknologi dan inovasi dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pabrik dan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar industri.

Selain itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Kementerian Perindustrian RI dapat berperan dengan memberikan pendampingan intensif kepada Koperasi terutama untuk membantu dalam proses penyusunan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) pabrik. Pada tahap ketiga ini, Bank Indonesia juga dapat berperan untuk mendukung fasilitasi bantuan sarana dan prasarana penunjang produksi Pabrik 3M melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memfasilitasi proses *business matching* dengan calon investor potensial yang tertarik untuk menanamkan modalnya pada Pabrik 3M berbasis Koperasi ini.

Koperasi sebagai Pemasar Produk Utama & Turunan 3M

Pada tahap terakhir ini, Koperasi memiliki peran sebagai pembuka akses pasar dan melaksanakan proses pemasaran dan penjualan hasil produk utama dan turunan 3M agar berhasil masuk pada rantai pasok, baik pada pasar domestik maupun ekspor. Adapun produk turunan 3M yang prospektif dalam rantai pasok industri terdiri dari produk turunan langsung (antara lain suplemen dan emulsi *anti-stunting*, *red stearin*, dan *soap flakes*) dan produk turunan tidak langsung (antara lain pakan ternak, pupuk *fross*, kosmetik, dan biodiesel).

Pada tahap ini dibutuhkan peran strategis dari beberapa lembaga untuk dapat membantu proses standardisasi dan sertifikasi produk. Proses standardisasi dan sertifikasi tersebut antara lain: (1) Badan Standardisasi Nasional (BSN) terkait penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI) baru terkait produk 3M, (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI terkait penerbitan izin edar Makanan Dalam (MD) BPOM, (3) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI terkait penerbitan sertifikat halal produk, dan (4) Kementerian Hukum dan HAM RI terkait penerbitan merek produk.

Mengatasi Pasokan Tebu Berkualitas yang Terbatas untuk Mendorong Kinerja Pertanian dan Menjaga Inflasi

Proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035 (BPS, 2013), menyebabkan kebutuhan gula dipastikan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Namun demikian, produksi gula dalam negeri tahun 2023 sebesar 2,35 juta ton masih jauh dari kebutuhan nasional sebesar 8,3 juta ton, yang terdiri dari kebutuhan industri sebesar 4,9 juta ton dan kebutuhan konsumsi sebesar 3,4 juta ton. Defisit ini mendorong tingginya impor gula sebesar 5,95 juta ton. Kondisi defisit ini memunculkan urgensi perbaikan struktural industri gula, terutama pada sentra produksi di Jawa.

P1: Perbaikan Faktor Produksi

Perkebunan tebu menghadapi beberapa tantangan baik dari sisi *on-farm* maupun *off-farm*. Di sisi *on-farm*, beberapa tantangan struktural utama kondisi tebu Jawa ialah 1) luas dan produktivitas lahan yang menurun; 2) implementasi GAP (*Good Agricultural Practices*) yang belum optimal sehingga rendemen bibit tidak maksimal; 3) *affordability* dan *accessibility* untuk pupuk yang terbatas. Sementara itu, tantangan utama dari sisi *off-farm* ialah metode pembayaran tebu dengan Sistem Bagi Hasil (SBH).

Luas lahan dan produktivitas lahan tebu di Jawa menunjukkan tren yang menurun. Penurunan luas lahan tebu di Jawa terutama didorong oleh peralihan lahan menjadi area industri dan perumahan. Produktivitas tebu juga menunjukkan penurunan, terutama disebabkan oleh kualitas varietas dan bibit yang kurang baik. Kondisi ini menjadi penyebab utama defisit gula konsumsi dan gula industri nasional sehingga kebutuhan impor berlanjut. Penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang lebih modern juga akan mampu mendorong produktivitas tebu.

P2: Perbaikan Regulasi & Kelembagaan

Ketersediaan pupuk subsidi turut menjadi faktor penentu produktivitas tebu. Produksi pupuk dalam negeri masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Lebih lanjut, terdapat kenaikan harga bahan baku impor pupuk, khususnya Kalium, yang dibutuhkan tanaman tebu dalam proses penanamannya. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kandungan

Kalium dari 15 menjadi 12 semakin menekan harga pupuk NPK. Di samping itu, tantangan terkait ketersediaan pupuk bagi tanaman tebu menjadi semakin tinggi karena komoditas lain, seperti padi dan jagung, juga membutuhkan pupuk NPK. Untuk mendapatkan pupuk NPK dengan kandungan K 15, petani harus membeli pupuk NPK Non-Subsidi, sehingga biaya produksi meningkat.

Ketersediaan pupuk subsidi pun masih memiliki tantangan lain akibat implementasi kartu tani yang belum optimal, karena petani harus tergabung dalam sebuah gapoktan yang memiliki akun SIMLUHTAN. Di samping itu, implementasi kartu tani belum optimal karena luasan akumulasi luas area lahan maksimal 2 hektar per NIK dan penebusan dilakukan berdasarkan alokasi yang didasarkan pada NIK dan alamat. Kendala dalam distribusi pupuk juga dapat terjadi karena petani yang belum memahami anjuran dosis optimal dan alokasi pupuk subsidi serta perbedaan data petani penggarap kebun akibat proses lelang kebun.

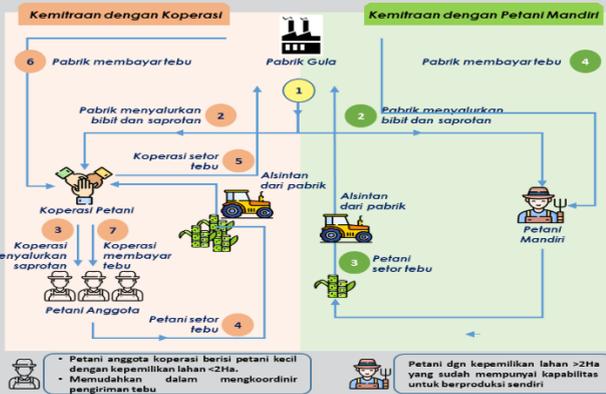
Merespons kondisi tersebut, optimalisasi penggunaan pupuk organik dapat menjadi alternatif solusi, di samping penguatan regulasi dan sinkronisasi distribusi pupuk subsidi melalui sinergi kementerian dan pemda setempat. Penggunaan pupuk organik pada fase olah lahan mampu mengurangi ketergantungan pada pupuk NPK. Penguatan peran monitoring petugas penyuluh lapangan (PPL) dan Dinas Pertanian terhadap data riil penggarap kebun dibutuhkan agar pupuk subsidi terdistribusi secara tepat sasaran.

P3: Kerjasama Perdagangan

Dalam upaya meningkatkan kinerja *on-farm*, penerapan Skema Beli Putus, seperti yang diterapkan salah satu perusahaan (Gambar III.10), dapat diimplementasikan lebih luas. Skema beli putus dapat meningkatkan jumlah tebu digiling, luas lahan, serta tingkat rendemen dari tebu. Perusahaan menjalankan kemitraan sistem beli putus dengan koperasi yang mengakomodir petani kecil serta petani mandiri yang berdampak pada peningkatan jumlah petani mitra, tebu digiling, luas lahan dan tingkat rendemen.

Melalui Skema Beli Putus, pabrik dapat mengatur budidaya tebu agar kualitas tebu terjaga dengan monitoring budidaya tebu yang dilakukan oleh pabrik secara rutin. Untuk meningkatkan jumlah petani yang

bermitra, perusahaan memiliki tiga program kemitraan yaitu *Drone Spray* (pemupukan melalui *drone*), Pinjam Bibit serta Penanaman Tebu Hijau dan Tebu Manis yang merupakan varietas unggul. Skema beli putus perlu diterapkan untuk mengatasi tantangan dari sisi produksi. Dengan perluasan kemitraan, pengurangan luas lahan tebu dapat dicegah. Program kemitraan memungkinkan pabrik untuk memiliki kontrol dalam mengkoordinir pengangkutan tebu sehingga biaya angkut lebih efisien.



Sumber: Korporasi

Gambar III.10. Skema Beli Putus

Dari sisi dukungan pembiayaan, skema *supply chain financing* (Gambar III.11) pada skema beli putus bagi Perusahaan Gula (PG) dapat dilakukan untuk menjawab tantangan kebutuhan likuiditas. Pola kemitraan yang terjalin dengan baik antara pabrik dan petani bisa meningkatkan kepastian pembayaran tebu karena pabrik memberikan rekomendasi atas petani potensial berdasarkan kinerja dan loyalitas.



Sumber: Asian Development Bank (ADB)

Gambar III.11. Skema Supply Chain Financing

Lebih lanjut, untuk menjawab tantangan adanya *lag waktu* pembayaran pada skema bagi hasil, pembiayaan

melalui skema *KUR Closed Loop* (Gambar III.12) dengan relaksasi *grace period* dapat menjadi solusi. Adanya *grace period* menjadi penting karena masa penanaman hingga panen tebu yang cukup lama, yaitu mencapai 12-14 bulan. Skema ini memungkinkan petani memiliki saprotan secara kredit serta jaminan kepastian pembelian dan pendampingan produksi dari pabrik. Bagi pabrik, skema ini memberikan jaminan pasokan bahan baku dengan harga yang lebih murah. Hal ini didukung dengan kondisi risiko (*non performing loan / NPL*) perkebunan tebu dan industri gula yang rendah dan aman (<5%), sehingga skema ini memungkinkan untuk dilaksanakan.



Sumber: Perbankan

Gambar III.12. Skema Kredit Closed Loop

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan asesmen yang telah kami lakukan, terdapat beberapa rekomendasi untuk penguatan implementasi hilirisasi tebu, yaitu:

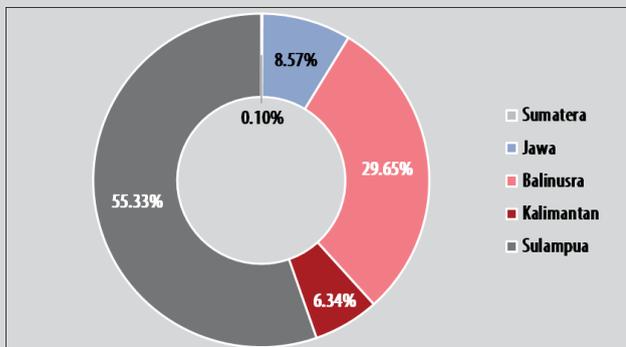
Pertama, penguatan produksi melalui penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), penerapan siklus rawat dan bongkar ratoon setelah 4x masa panen tebu untuk mencapai kapasitas maksimal produktivitas dari bibit saat ini. **Kedua**, perluasan lahan Hak Guna Usaha (HGU), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan lahan petani rakyat di sekitar pabrik gula untuk menjawab tantangan perluasan lahan. **Ketiga**, untuk menjawab tantangan ketersediaan pupuk subsidi (NPK) yang terbatas, dibutuhkan sinkronisasi waktu distribusi pupuk subsidi dan pengawasan melalui kolaborasi dalam penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran. **Keempat**, penerapan kemitraan Sistem Pembelian Tebu (SPT) pembiayaan dapat dilakukan melalui skema *Supply Chain Financing* untuk menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan bagi pabrik.

Hilirisasi Rumput Laut Sebagai Daya Ungkit Mendorong Perekonomian Nasional

Asesmen Industri Rumput Laut Balinusra

Perbaikan Faktor Produksi (P1)

Balinusra menduduki peringkat kedua dalam produksi rumput laut terbesar secara nasional. Volume produksi rumput laut di Balinusra mencapai 2,2 juta ton pada tahun 2022, atau sekitar 29% dari produksi rumput laut nasional (Grafik III.12). Produksi rumput laut di Balinusra sebagian besar berasal dari NTT dan NTB, sedangkan di Bali masih relatif rendah. Namun demikian, budidaya rumput laut Bali berkembang pesat pada tahun 2020 seiring dengan beralihnya pekerja sektor pariwisata ke sektor pertanian budidaya rumput laut. Sementara dari sisi luas lahan, area budi daya rumput laut di NTT mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 seiring dengan gencarnya program Pemerintah untuk mendorong budidaya rumput laut.



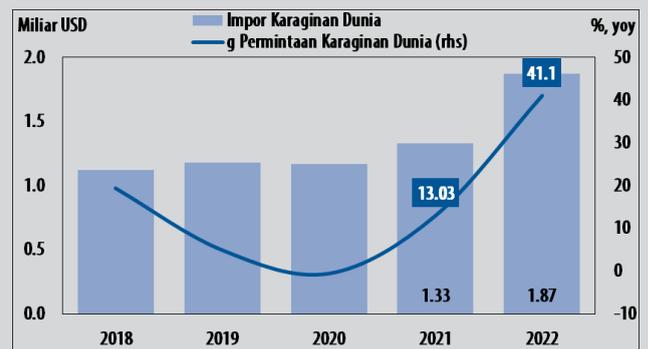
Sumber: BPS 2017 – 2021, diolah

Grafik III.12. Pangsa Produksi Rumput Laut Indonesia

Penurunan hasil produksi dan kualitas rumput laut disebabkan oleh pemakaian sumber bibit hasil budidaya secara berulang. Penggunaan bibit rumput laut hingga lebih dari 2 tahun yang diakibatkan belum tersedianya sumber bibit unggul, telah menyebabkan produktivitas rumput laut di NTT dan Bali mengalami tren penurunan.

Jenis rumput laut yang bernilai ekspor tinggi, dapat dibudidayakan di wilayah Balinusra. Karaginan sebagai produk turunan pengolahan rumput laut terdiri dari tiga jenis, yaitu: *Alkali Treated Chips* (ATC), *Semi Refined Carrageenan* (SRC), dan *Refined Carrageenan* (RC) yang dihasilkan dari proses pengolahan berjenjang. Jenis rumput laut yang digunakan utamanya *Cottonii* dan *Spinusum*. Mayoritas ekspor Indonesia ialah dalam bentuk rumput laut

kering, sedangkan ekspor karaginan masih terbatas meski memiliki daya saing yang cukup tinggi secara global. Hilirisasi rumput laut menjadi karaginan sangat potensial karena permintaan karaginan global juga semakin meningkat tiap tahunnya (Grafik III.13).



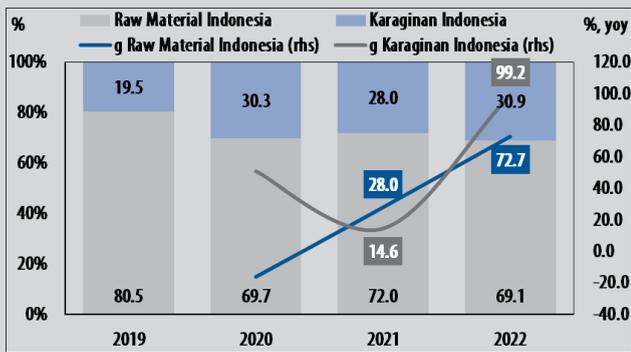
Sumber: TradeMap 2022, diolah

Grafik III.13. Permintaan Karaginan Global

Pengaturan dan Kelembagaan (P2)

Implementasi roadmap pengembangan industri rumput laut menemui sejumlah kendala. Pemerintah pusat melalui Perpres No. 33/2019 menerbitkan *roadmap* yang secara rutin dimonitor dan dievaluasi setiap tahunnya sejak 2018. Dengan adanya *roadmap* tersebut, pengembangan industri rumput laut menjadi lebih terarah dan mampu mendorong peningkatan investasi Tiongkok pada industri pengolahan rumput laut, hingga akhirnya mendorong perbaikan komposisi ekspor rumput karaginan Indonesia (Grafik III.14). Meski demikian, belum adanya tarif dan kuota ekspor bahan baku menyebabkan ekspor rumput laut kering masih tinggi.

Kebijakan stimulus fiskal berdampak signifikan dalam peningkatan industri hilir rumput laut di Tiongkok. Kebijakan stimulus ekspor Tiongkok bagi industri produk olahan rumput laut berupa pengembalian fiskal sebesar 15-35% telah mendorong pesatnya industrialisasi rumput laut Tiongkok. Besarnya permintaan karaginan dunia mendorong Tiongkok untuk melakukan ekspansi dengan melalui investasi beberapa industri pengolahan rumput laut di Indonesia, sehingga mendorong peningkatan kapabilitas di sisi hilir. Meskipun demikian, belum adanya tata niaga rumput laut di Indonesia menyebabkan harga rumput laut kering di tingkat petani memiliki volatilitas yang cukup tinggi.



Sumber: Bea Cukai 2022, diolah

Grafik III.14. Komposisi Ekspor Rumput Laut Indonesia

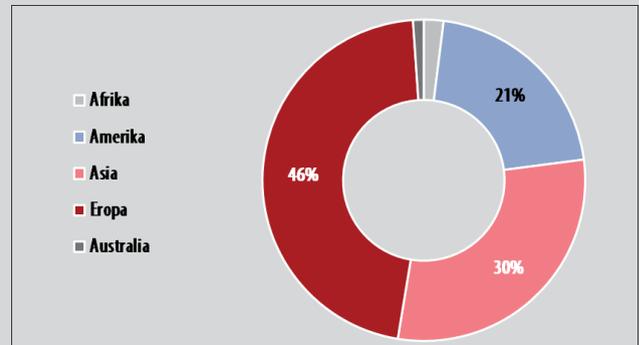
Penerbitan Pergub NTT No. 106/2022 untuk mendorong hilirisasi rumput laut di Balinusra. Sekitar 80% produksi rumput laut yang karaginan dunia diproduksi oleh Indonesia, dan produksi dari Balinusra menempati urutan kedua terbesar. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah rumput laut di NTT, melalui Pergub NTT No. 106/2022, dilakukan pelarangan ekspor rumput laut dalam bentuk bahan baku ke luar NTT. Dalam implementasi Pergub tersebut, terdapat tantangan terbatasnya kapasitas pabrik pengolahan rumput laut di NTT, sehingga hasil produksi rumput laut di NTT tidak dapat diserap semua oleh industri dan menyebabkan harga di tingkat pembudidaya mengalami penurunan.

Sementara itu dari sisi hulu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya rumput laut. Penjualan hasil panen rumput laut dari petani masih mengandalkan jalur tradisional dengan tingginya peran tengkulak/pengepul. Berdasarkan survei BPS, 95% petani rumput laut di Balinusra memilih untuk menjual hasil panennya kepada pengepul seiring dengan kuatnya ikatan sosial maupun ekonomi yang terjalin. Oleh karena itu, pengembangan pola kemitraan menjadi elemen penting yang dapat meningkatkan kepastian penjualan, stabilitas harga dan peningkatan akses pembiayaan.

Penguatan Kerja Sama dan Perdagangan (P3)

Benua Eropa merupakan pasar karaginan terbesar di dunia dengan pangsa mencapai 46% (Grafik III.15). Namun demikian, tujuan utama ekspor karaginan Indonesia bukanlah ke kawasan Uni Eropa, melainkan ke Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok merupakan eksportir karaginan terbesar ke kawasan Uni Eropa. Untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia, perlu dilakukan perbaikan produksi

produk turunan dan penguatan kerja sama serta sertifikasi internasional untuk produk karaginan Indonesia agar bisa diekspor ke Eropa. Berdasarkan produk turunannya, sebagian besar ekspor karaginan Balinusra adalah jenis ATC, sedangkan di Sulampua dan Jawa adalah jenis SRC dan RC yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.



Sumber: TradeMap 2022, diolah

Grafik III.15. Share Demand Karaginan Global

Rekomendasi Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Balinusra

Success Story – Zero-Waste Hilirisasi Produk Rumput Laut Berbasis Home Industry di Bali

Pengembangan industri rumput laut perlu memerhatikan karakteristik dan keunggulan daerah. Sejalan dengan hasil produksi rumput laut di Bali yang relatif masih kecil, pengolahan menjadi produk turunan bernilai tambah dapat dilakukan berbasis *home industry* yang tidak memerlukan nilai dan skala investasi yang besar. Salah satu UMKM asal Nusa Lembongan Bali berhasil melakukan pengolahan rumput laut menjadi sabun dan makanan, meski masih berbasis rumahan namun nilai tambah yang dihasilkan lebih dari 3,6 kali lipat, lebih tinggi dari nilai tambah karaginan jenis RC.

Produk ditujukan bagi industri pariwisata yang telah memiliki pasar tersendiri. Melalui saripati rumput laut hasil panen dari pembudidaya di Nusa Lembongan, UMKM melakukan pengolahan rumput laut jenis menjadi produk sabun dan deterjen yang terdiri atas: *hand wash, dish soap, laundry detergent, dan body wash*. Ampas pengendapan rumput laut pun turut diolah menjadi produk olahan berupa keripik rumput laut, sehingga telah menerapkan pengolahan berbasis *zero-waste*.

Hilirisasi Perikanan di Sulampua Masih Terkonsentrasi pada Industri Antara

Hilirisasi perikanan Sulampua memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut ditunjukkan oleh produksi perikanan tangkap di Sulampua pada kurun waktu 2017 – 2021 dengan pangsa sebesar 56,48% secara nasional (Tabel III.1). Meski demikian, produk ekspor ikan segar dan olahan masih terpusat di Jawa, sementara produk ekspor ikan segar dan olahan di Sulampua masih terbatas.

Tabel III.1. Produksi Perikanan Tangkap 2017 - 2021

Wilayah	Rata-rata Produksi 2017-2021 (Ton)			
	Cakalang	Tongkol	Tuna	Total
Sumatera	59,412	158,618	29,660	247,690
Jawa	53,883	103,766	30,831	188,480
Balibusra	34,137	55,483	27,994	117,615
Kalimantan	5,837	27,418	2,206	35,461
Sulampua	325,171	193,128	246,523	764,822

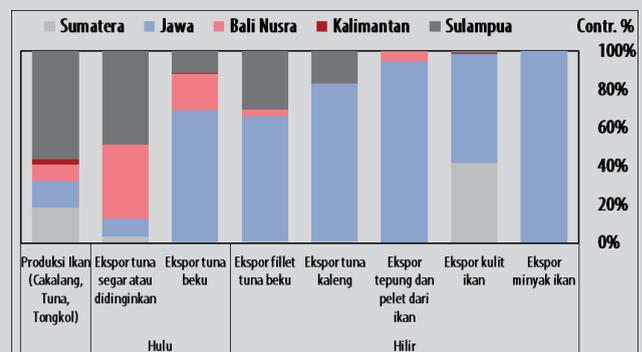
Sumber: BPS

Berdasarkan pohon industrinya, sektor pengolahan ikan di Sulampua sebagian besar masih menghasilkan produk antara (ikan kaleng, loin tuna, dan ikan beku), sementara produk turunan (minyak ikan, minyak sirip ikan, tepung ikan, gelatin, bahan pendukung farmasi) masih belum optimal. Beberapa perusahaan telah melakukan hilirisasi secara *end-to-end*, khususnya di Sulawesi Utara, dengan produk utama berupa olahan tuna dan cakalang. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjalin kemitraan dengan pelaku usaha di Jepang dan domestik untuk memasok kebutuhan ikan tuna *ready-to-eat*, ikan kayu *katsuobushi*, dan ikan kayu *powder*.

Negara tujuan utama ekspor perikanan Sulampua saat ini adalah Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok. Negara tujuan ekspor potensial lainnya adalah Eropa dengan nilai konsumsi ikan yang cukup tinggi secara global. Namun demikian, ekspor ke pasar Eropa masih terkendala bea masuk yang tinggi sehingga produk ekspor Indonesia masih kalah bersaing dengan produk serupa dari Vietnam dan Filipina. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dukungan pemerintah terkait percepatan penyelesaian perjanjian kerjasama perdagangan Eropa-Indonesia yaitu *European Union Comprehensive Partnership Agreement* (IEU – CEPA) sehingga produk ekspor Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif. Tercatat 30 perusahaan di Sulampua sudah memiliki persyaratan ekspor mutu dan kesehatan pangan (HACCP, GMP dan Codex) sehingga telah memenuhi

persyaratan untuk melakukan ekspor perikanan ke Eropa.

Investasi perikanan Sulampua saat ini masih terbatas dan berorientasi pada investasi produk antara, sehingga hilirisasi perikanan tingkat lanjut menjadi salah satu tantangan utama di Sulampua. Produk residual ikan (seperti hati, sirip, kepala, kulit, dan tulang) yang dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi (minyak ikan, minyak sirip ikan, tepung ikan, gelatin, dan bahan pendukung farmasi) belum banyak diolah dan baru dimanfaatkan secara terbatas sebagai penambah nutrisi pakan ternak. Belum banyak industri besar di Sulampua yang menampung produk residual ikan tersebut. Selain itu, industri pendukung perikanan, seperti industri pengalengan, plastik, dan *packaging* masih berasal dari Jawa. Oleh karena itu, hilirisasi tingkat lanjut membutuhkan dukungan *local value chain* dengan Jawa sebagai pusat manufaktur perikanan nasional.



Sumber: DJBC, 2022

Grafik III.16. Pangsa Industri Pengolahan Ikan Nasional

Beberapa tantangan dari sisi hulu turut memengaruhi perkembangan industri perikanan di Sulampua, khususnya yang terkait dengan penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Pasca Produksi. Kebijakan PIT merupakan pengaturan penangkapan berdasarkan area dan pembatasan kuota untuk melindungi stok ikan nasional dalam jangka Panjang. Kebijakan ini diterapkan sejak 2021 di WPP-714 (Perairan Sulawesi Tenggara dan Maluku). Sementara kebijakan PHP Pasca Produksi merupakan perwujudan aspek *fairness* dalam penghitungan pungutan PNBP karena ikan wajib didaratkan dan dihitung besaran pajaknya di wilayah tangkapan. Dalam jangka panjang, penerapan Kebijakan PIT dan PHP Pasca Produksi akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor

perikanan. Namun demikian, dalam jangka pendek kewajiban pendaratan ikan di Pelabuhan Samudera (WPP setempat) dikeluhkan pelaku usaha karena menimbulkan biaya tambahan untuk pengangkutan logistik ikan yang akan memengaruhi kualitas ikan. Selain itu, peralihan kewenangan perizinan kapal dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat belum dipahami dengan baik oleh pelaku usaha sehingga berpengaruh pada operasionalisasi kapal.

Dengan pertimbangan potensi bahan baku, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan akses pasar ekspor, maka wilayah Sulsel, Sulut, Sultra, dan Maluku lebih diprioritaskan untuk pengembangan industri perikanan. Hal ini didukung oleh strategi investasi dan kerjasama perdagangan. Model pembiayaan sektor

perikanan dapat ditempuh melalui *pre-* maupun *post-shipment financing*. *Pre-shipment financing* adalah fasilitas pembiayaan dari bank kepada penjual sebelum penjual melakukan pengiriman barang kepada *buyer*. Sementara itu, *post-shipment financing* adalah pembiayaan bank kepada penjual setelah barang dikirim sampai pembayaran tagihan atas ekspor oleh *buyer*. Kedua model pembiayaan ini dapat membantu pelaku industri perikanan di wilayah tersebut untuk dapat mengatasi tantangan keuangan dan memaksimalkan potensi bisnis. Melalui strategi investasi yang tepat dan kerjasama perdagangan yang efektif, industri perikanan di wilayah Sulsel, Sulut, Sultra, dan Maluku diharapkan dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah dan negara secara keseluruhan.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Firman Mochtar

Koordinator Penyusun

M. Abdul Majid Ikram
Kurniawan Agung W.

Tim Penulis

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Grup Sektoral dan Regional

Asrianti Mira Anggraeni

Ratih Puspitasari

Oki Hermansyah

Ajeng Ratna Kartina

Ide Mahendra

Sheila Reswari

Irham Ilmanel Abdinni

Muhammad Arifian Adin

Refdamas Dwiaji Wisnumurti

Archie Flora Anisa

Grup Ekonomi Makro

M. Yafi Satryatama

Kantor Perwakilan BI Prov. Sumatera Utara

Erinetta Lomoria

Ajeng Ardhia Arya Kusuma Putri

Kantor Perwakilan BI Prov. Jawa Timur

Gandhiano Dwi Putera

Ramdha Dien Azka

Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Selatan

Aditya Wiratama Putra

Tolong Enrica Stefani Dutriandra

Kantor Perwakilan BI Prov. Bali

Reffi Marizka Dewi

Bagas Naufal Prayitno

Kantor Perwakilan BI Prov. Sulawesi Selatan

Dita Khadijah

Afrah Asfarina Ghassani

Departemen Regional

Christina Irawadi

Deasy Andarina

Citra Agustina

Hanan Mutiasari

Rama Rahardian P

Departemen Pengembangan UMKM dan
Perlindungan Konsumen

Mira Rahmawaty

Wahyunindia Rahman

Departemen Kebijakan Makroprudensial

Dhaha Praviandi Kuantan

Risa Fadila

Nadhil Auzan Oktaviandhi

Muhammad Farhan Perdana



Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10350

www.bi.go.id